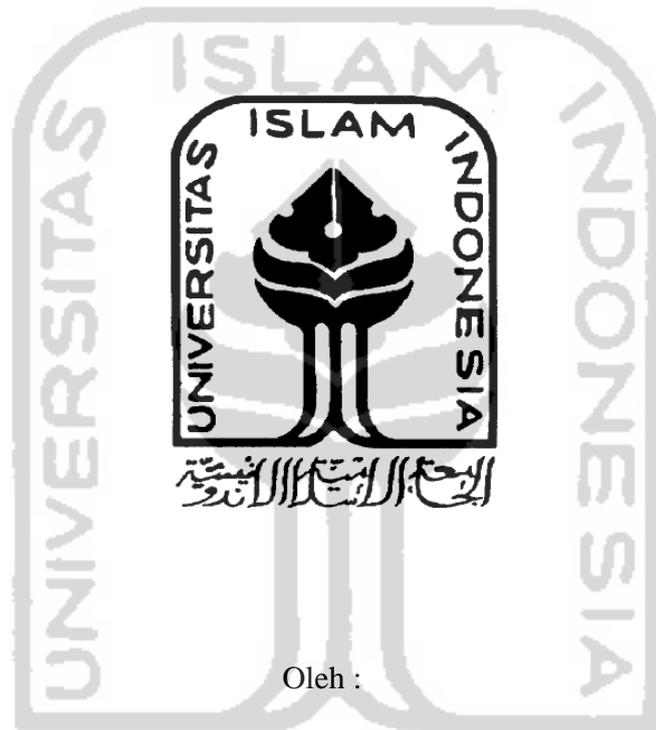


**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP
PENGANGGURAN, KEMISKINAN DAN PARTISIPASI POLITIK
MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI MEDIATOR**

(Studi pada 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah

Periode 2004-2010)



Oleh :

Nama : Aulia Rachman Hutauruk

Nomor Mahasiswa : 04312311

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2011

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP
PENGANGGURAN, KEMISKINAN DAN PARTISIPASI POLITIK
MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI MEDIATOR**

(Studi pada 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah

Periode 2004-2010)

SKRIPSI

**Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas
Ekonomi UII**

Oleh :

Nama : Aulia Rachman Hutauruk

No.Mahasiswa : 04312311

FAKULTAS EKONOMI

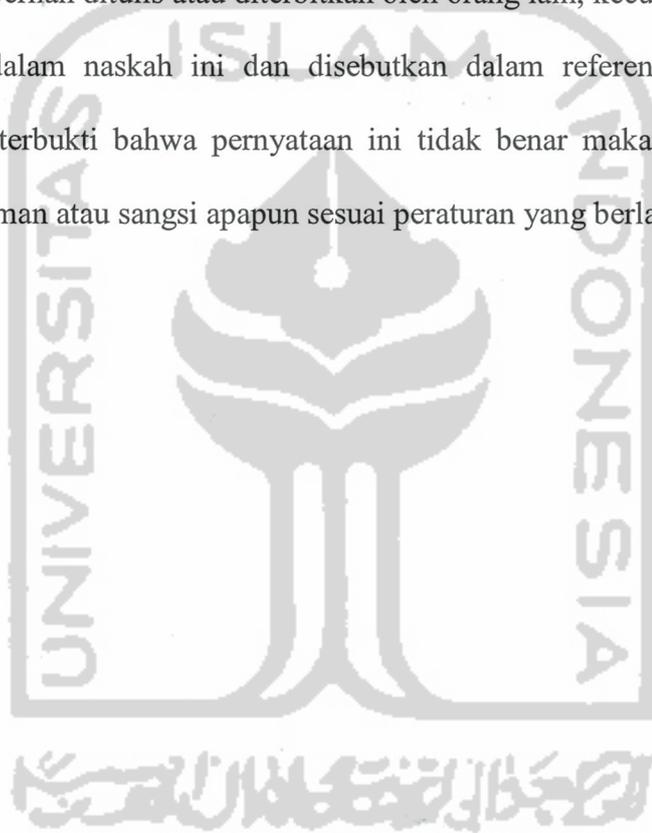
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2011

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.



Yogyakarta, 12 Desember 2011

Penyusun,



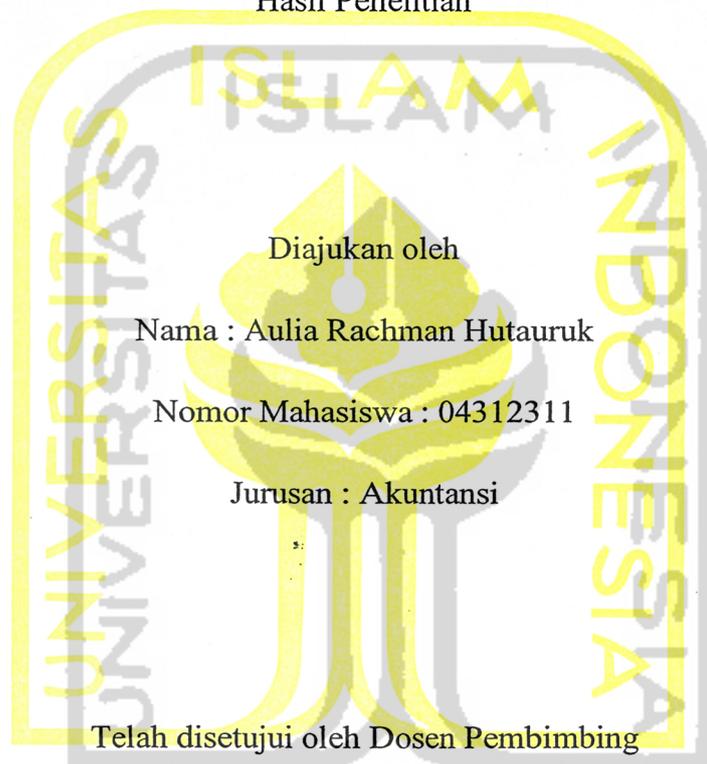
(Aulia Rachman Hutauruk)

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGANGGURAN,
KEMISKINAN DAN PARTISIPASI POLITIK**

MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI MEDIATOR

(Studi pada 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2004-2010)

Hasil Penelitian



Diajukan oleh

Nama : Aulia Rachman Hutauruk

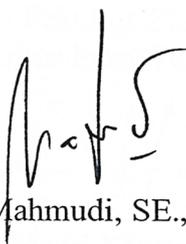
Nomor Mahasiswa : 04312311

Jurusan : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal...14...Des...2011

Dosen Pembimbing,



(Mahmudi, SE.,M.Si.)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengangguran,
Kemiskinan dan Partisipasi Politik Melalui Pertumbuhan Ekonomi
Sebagai Mediator**

**Disusun Oleh: AULIA RACHMAN H
Nomor Mahasiswa: 04312311**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 17 Januari 2011

Penguji/Pemb. Skripsi : Mahmudi, SE, M.Si, Ak

Penguji : Dra. Reni Yendrawati, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
الجامعة الإسلامية
Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	x
Daftar Tabel	xiv
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Lampiran.....	xvi
Abstraksi.....	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Batasan Masalah.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1 Kinerja Keuangan	13

2.1.2. Indikator Kinerja Keuangan.....	14
1. Rasio Kemandirian	15
2. Rasio Efektivitas.....	15
3. Rasio Efisiensi	16
4. Rasio Pajak Daerah terhadap PAD.....	17
5. Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD.....	18
6. Rasio Belanja Aparatur terhadap Total Belanja	18
7. Rasio Belanja Pelayanan Publik terhadap Total Belanja	19
2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.1.4. Pengangguran.....	20
2.1.4.1. Sebab-sebab Terjadinya pengangguran.....	22
2.1.4.2. Dampak-dampak Pengangguran terhadap Perekonomian.....	23
2.1.4.3. Kebijakan-kebijakan Pengangguran.....	25
2.1.5. Kemiskinan	26
2.1.5.1. Pengertian Kemiskinan.....	28
2.1.5.2. Ukuran Kemiskinan.....	31
2.1.6. Partisipasi Politik	31
2.1.7. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	35
2.1.8. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemiskinan, Pengangguran dan Partisipasi Politik melalui Pertumbuhan Ekonomi	36
2.2. Penelitian Terdahulu.....	38
2.3. Pengembangan Hipotesis	39
2.3.1. Hubungan Kinerja Keuangan terhadap	

Pertumbuhan Ekonomi.....	39
2.3.2. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Partisipasi Politik	43
2.4. Kerangka Hipotesis	47

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	48
3.2. Metode Pengumpulan Data	49
3.3. Devinisi Operasional Variabel dan Pengukuran	50
3.3.1. Variabel Kinerja Keuangan.....	50
1. Rasio Kemandirian.....	51
2. Rasio Efektivitas	51
3. Rasio Efisiensi	52
4. Rasio Pajak Daerah terhadap PAD	52
5. Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD	53
6. Rasio Belanja Aparatur terhadap Total Belanja.....	53
7. Rasio Belanja Pelayanan Publik terhadap Total Belanja.....	54
3.3.2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi.....	54
3.3.3. Variabel Pengangguran.....	55
3.3.4. Variabel Kemiskinan	55
3.3.5. Variabel Partisipasi Politik	55
3.4. Teknik Analisis Data	56
3.4.1. Pengujian dengan Model PLS.....	56

BAB IV ANALISIS DATA

4.1. Sampel Penelitian	58
4.2. Analisis Data dengan PLS	59
4.3. Hasil Pengujian Penelitian.....	60
4.4. Pembahasan	73
1. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi	74
2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Partisipasi Politik.....	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Keterbatasan	79
5.3. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	82
--------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

4.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama	60
4.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua	61
4.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga.....	62
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis Keempat	63
4.5 Hasil Pengujian Hipotesis Kelima.....	65
4.6 Hasil Pengujian Hipotesis Keenam	66
4.7 Hasil Pengujian Hipotesis Ketujuh.....	67
4.8 Hasil Pengujian Hipotesis Kedelapan	68
4.9 Hasil Pengujian Hipotesis Kesembilan	70
4.10 Hasil Pengujian Hipotesis Kesepuluh	71
4.11 Hasil Pengujian Hipotesis	72



DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka hipotesis	47
4.1 Hasil Pengujian dengan PLS	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Rekapitulasi Data Penelitian	82
Lampiran 2 Hasil Olah data.....	93



HALAMAN PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Karya Ini Untuk Ayah dan Ibu Ku

H. Yuliaman Hutauruk (Alm) & Hj. Noor Fatimah

Dan Saudara-saudara yang ku Cintai,

Arief Budiman Hutauruk & M. Nur Hidayat Hutauruk

Dan Kepada Orang-orang Yang Saya Cintai...

HALAMAN MOTTO

Katakanlah: "Hai hamba-hambaKu yang beriman bertakwalah kepada Tuhanmu". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini (pasti akan) memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas"

(Q.S. Az-Zumar [39]:10)

Ketika Tuhanmu Mengumumkan " Jika kamu bersyukur atas karuniaku, niscaya pasti Aku tambahkan untukmu, dan jika kamu berlaku ingkar kepada Ku, sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"

(Q.S Ibrahim [7]:13)

"Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berpengetahuan diantaramu beberapa tingkat lebih tinggi, Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan"

(Q.S. Al Mujadilah [28]:11)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

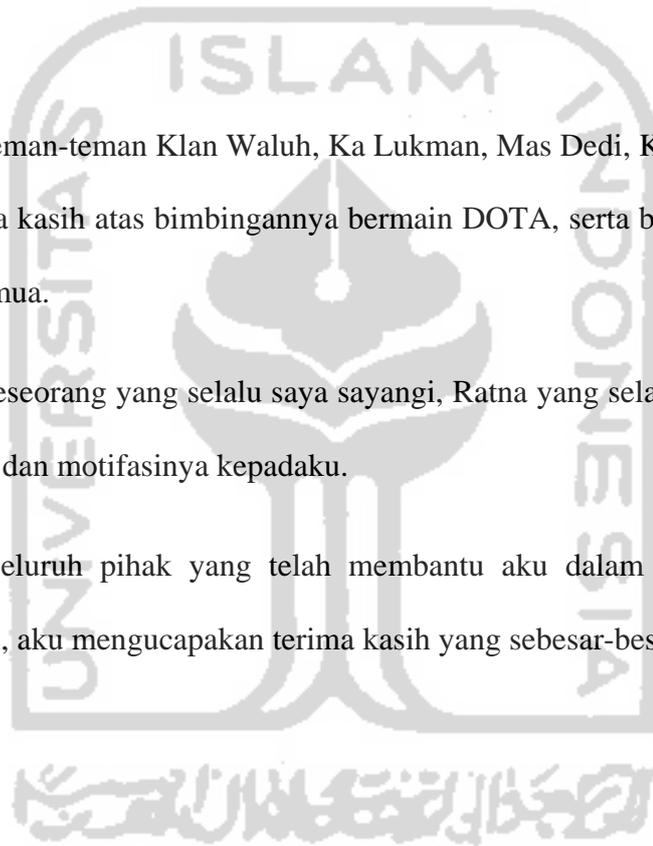
Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas karunia dan limpahan rahmat yang tak terhingga dan atas kesempatan serta waktu yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGANGGURAN, KEMISKINAN DAN PARTISIPASI POLITIK MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI MEDIATOR”, di samping juga sebagai prasyarat untuk menyelesaikan studi strata 1 dalam meraih gelar sarjana.

Dalam penulisan ini tentunya penulis tidak lepas dari segala kekurangan dan kesalahan. Untuk itu di harapkan pada penelitian mendatang ada perbaikan demi kesempurnaan hasil penelitian berikutnya. Disamping itu dalam proses penyusunan hingga skripsi ini dapat diselesaikan, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada ku sehingga bisa mengerjakan skripsi ini sampai selesai. Aku hanya bisa mengucapkan syukur kepadamu atas segala nikmat yang telah engkau berikan, semoga Engkau selalu memberikan kemudahan dalam segala hal dan selalu menuntun ku kejalan yang benar. Amin.

2. Kedua orang tua, H. Yuliaman Hutauruk (Alm) dan Hj.Noor Fatimah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua ku, atas segala dukungannya baik secara moril maupun materil. Yang telah memberikan saya semangat yang tak pernah berhenti, memberikan yang terbaik buat ku, yang selalu mendo'akan ku, sungguh aku sangat menyayangi kalian. Semoga amal kebaikan kalian Allah yang akan membalasnya.
3. Bapak Prof. Dr. Eddy Suandi Hamid, M. Ec, selaku Rektor UII.
4. Bapak Prof. Drs. Hadri Kusuma, MBA., DBA , selaku Dekan Fakultas Ekonomi UII.
5. Bu Isti Rahayu, M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi FE UII.
6. Pak Mahmudi, SE.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih banyak atas bimbingannya sehingga skripsi ini bisa selesai.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi, terutama dosen jurusan Akuntansi atas ilmu pengetahuannya.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
9. Kepada adik-adik ku Arief Budiman Hutauruk dan M. Nur Hidayat Hutauruk terima kasih atas segala dukungannya.
10. Kepada seluruh keluarga besar ku yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

11. Kepada teman-teman Akuntansi 2004, Wisnu, Arung, Didit, Dani, Riki, Desvien, Rasyid Ridha dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan dan doa kalian semua.
12. Kepada Mas Arief yang selama ini memberiku saran yang membangun hingga selesainya skripsiku ini. Terima kasih atas segala bantuan dan doanya.
13. Kepada teman-teman Klan Waluh, Ka Lukman, Mas Dedi, Ka Agus dan Ka Pii, terima kasih atas bimbingannya bermain DOTA, serta bantuan dan doa kalian semua.
14. Kepada seseorang yang selalu saya sayangi, Ratna yang selalu memberikan semangat dan motifasinya kepadaku.
15. Kepada seluruh pihak yang telah membantu aku dalam menyelesaikan skripsi ini, aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.



**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP
PENGANGGURAN, KEMISKINAN DAN PARTISIPASI POLITIK
MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI MEDIATOR**

(Studi pada 29 Kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Tengah

Periode 2004-2010)

Aulia Rachman Hutauruk

04312311

Abstraksi

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji secara langsung variabel kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, untuk menguji secara langsung dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran, kemiskinan dan partisipasi politik, juga untuk meneliti variabel tidak langsung antara kinerja keuangan terhadap pengangguran, kemiskinan dan partisipasi politik. Sampel dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah selama periode 2004-2010.

Hasil penelitian dengan menggunakan PLS menunjukkan bahwa variabel kinerja keuangan yang berupa rasio efektifitas dan rasio pajak daerah terhadap PAD, secara langsung berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio retribusi daerah terhadap PAD, rasio belanja aparatur terhadap total belanja dan rasio belanja publik terhadap total belanja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan adanya pengaruh positif secara signifikan. Untuk pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan terdapat pengaruh negatif yang signifikan. Sedangkan untuk pengujian pertumbuhan ekonomi, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik. Pada pengujian secara tidak langsung antara variabel kinerja keuangan terhadap kemiskinan, menunjukkan rasio efektivitas dan rasio pajak daerah terhadap PAD tidak langsung berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Keyword: kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, partisipasi politik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan. Tuntutan yang semakin tinggi diajukan terhadap pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan yang diamanatkan kepada mereka. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah daerah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah. Oleh sebab itu, kinerja sektor publik atau dalam hal ini pemerintah daerah mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat.

Menurut Robertson (2002) dalam Fachruzzaman dan Norman (2010) pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk di dalamnya informasi atas efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa baik suatu barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan, dan sejauhmana pelanggan merasakan kepuasan atas barang dan jasa yang diberikan serta hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan).

Berdasarkan pendapat Robertson (2002) di atas, maka hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah

pada publik sebagai pengembalian amanat rakyat. Pengukuran tersebut akan memperlihatkan apakah kinerja pemerintahan daerah tersebut sudah sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai ataukah belum. Jadi, penilaian masyarakat terhadap pengukuran hasil pengukuran kinerja juga mencerminkan sejauhmana tingkat kepuasan masyarakat terhadap hasil kerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa hasil pengukuran kinerja mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat, dan komponen utama yang paling mendapat sorotan publik adalah masalah finansial (keuangan), karena hal ini menunjukkan bagaimana pengaturan dan pemanfaatan sumberdaya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah tersebut. Sesuai dengan pendapat Hamzah (2008) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah. Daerah dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan kebesarannya atau menjadi tidak berdaya tergantung pada cara mengelola keuangannya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu indikator bagi pengelolaan keuangan daerah. Menurut Permendagri No 13/2006 pada pasal 4 tentang azas umum pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa: keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan

bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan konsep tentang kinerja yang telah diuraikan di atas, maka kinerja keuangan mencakup aspek pertanggungjawaban dan transparansi terhadap masyarakat pada pemanfaatan sumber daya finansial dalam kaitannya dengan arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah.

Sasaran yang ingin dicapai oleh suatu pemerintah daerah tertuang pada visi dan misi masing-masing pemerintah daerah, tetapi secara umum sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam kegiatan pembangunan adalah sama yaitu untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu indikator dari peningkatan kesejahteraan adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Harianto dan Adi (2007) tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi regional menunjukkan jumlah kenaikan pendapatan yang dapat dihasilkan oleh tiap orang dalam suatu wilayah tertentu. Makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah berarti makin besar pula pendapatan masyarakat, begitu pula sebaliknya jika makin

rendah tingkat pertumbuhan ekonomi daerah berarti makin kecil pula pendapatan masyarakat di daerah tersebut.

Dalam kegiatan pembangunan, sektor ekonomi berperan penting karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan memberikan dampak yang sangat luas bagi masyarakat dan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor-sektor yang lain. Tujuan akhir dari pembangunan pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan berada dalam kondisi yang terus menerus meningkat. Sesuai pendapat Esmara dalam Tisna (2008) yang menyatakan bahwa: menurut ilmu ekonomi terdapat berbagai teori yang membahas tentang pembangunan ekonomi harus ditangani untuk mengejar keterbelakangan. Ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat.

Sesuai dengan pendapat di atas, maka pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan dan juga menunjukkan bagaimana tingkat kemakmuran masyarakat dalam suatu wilayah. Kemakmuran masyarakat tersebut menyebabkan berbagai dampak pada semua aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Di Indonesia, salah satu permasalahan ekonomi yang mendapat perhatian yang cukup

serius dari pemerintah adalah masalah kemiskinan. Seperti tertuang dalam dua arahan Presiden RI pada Tanggal 6 Oktober 2008 kepada Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkesra) bahwa strategi dalam menghadapi masa sulit adalah dengan: alokasi anggaran yang memadai untuk membangun infrastruktur dan SDM dengan fokus pada penanggulangan kemiskinan. Arahan Presiden RI tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan dalam masyarakat yang harus segera ditangani.

Selain arahan yang pertama seperti yang diuraikan di atas, arahan yang disampaikan Presiden RI kepada Kemenkesra yang kedua adalah: mengoptimalkan anggaran untuk tetap memacu pembangunan yang *pro poor*, *pro job creation* dan *pro growth* pada sektor ekonomi makro dan mikro sektor riil. Berdasarkan arahan tersebut selain masalah kemiskinan maka pengangguran juga menjadi fokus, karena kebijakan yang *pro job creation* dimaksudkan untuk melakukan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan guna mengatasi masalah pengangguran.

Berdasarkan kedua arahan Presiden RI tersebut, maka semakin jelas bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah memang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan mencoba untuk mengungkapkan pengaruh kinerja keuangan yang merupakan indikator pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang sama pernah

dilakukan oleh Hamzah (2008) yang memperoleh hasil bahwa kinerja keuangan yang diproksi dengan rasio kemandirian¹, rasio kemandirian², dan rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, terdapat pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran dan pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Dengan mempertimbangkan salah satu keterbatasan penelitian Hamzah (2008) yang hanya menggunakan beberapa rasio sebagai proksi kinerja keuangan, maka penelitian yang akan dilakukan ini akan ditambahkan beberapa rasio yaitu: Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, Retribusi Daerah terhadap PAD, Belanja Aparatur terhadap Total Belanja, dan Belanja Pelayanan Publik terhadap Total Belanja. Dengan penambahan keempat rasio ini diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan dalam tinjauan sebagai pengelolaan keuangan daerah khususnya mengenai kebijakan dalam pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan.

Sesuai dengan fenomena yang saat ini berkembang bahwa bagaimana pemanfaatan sumber daya finansial pemerintah daerah bagi masyarakat yang mendapat sorotan publik, maka dalam penelitian ini akan mencoba untuk mengungkapkan pengaruh penilaian masyarakat terhadap kebijakan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah melalui partisipasi politik masyarakat. Pengelolaan yang dinilai baik akan menjadikan masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah daerah sehingga partisipasi politik masyarakat mengalami

peningkatan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan ditambahkan aspek politik dengan indikator partisipasi politik.

Hubungan antara kinerja ekonomi dengan aspek politik sesuai dengan pendapat Notosusanto (2000) yang menyatakan bahwa: berkaitan dengan entitas ekonomi dalam politik pembangunan yaitu tidak mengejar keuntungan pribadi atau kelompok untuk jangka pendek, tetapi menanamkan hakekat pembangunan yang transparan, bertanggung jawab, menguntungkan semua pihak dan berlangsung secara menyeluruh serta berkesinambungan. Sesuai dengan pendapat tersebut maka terdapat hubungan antara aspek politik dengan kinerja keuangan khususnya jika ditinjau melalui sudut pandang transparansi dan pertanggungjawaban pada publik.

Pada hubungan antara pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikator kesejahteraan masyarakat dengan partisipasi politik masyarakat secara jelas dikemukakan oleh Sosialismanto (2001) yang menyatakan bahwa: menurut teori pembangunan kontemporer terdapat penekanan politik dari aspek kebebasan dan kesejahteraan masyarakat, sebagai subyek pembangunan mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan pendapat tersebut maka terdapat hubungan antara partisipasi politik masyarakat dengan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang: “ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PENGANGGURAN, KEMISKINAN DAN PARTISIPASI POLITIK MELALUI

PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI MEDIATOR”. Dalam penelitian ini studi akan dilakukan pada Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) di Propinsi Jawa Tengah karena kemiskinan yang menjadi salah satu topik utama dalam penelitian ini merupakan *issue* strategis dan mendapatkan prioritas utama untuk ditangani, seperti terdapat dalam Renstra Jawa Tengah (Perda No. 11/2003), Pergub 19 tahun 2006 tentang Akselerasi Renstra.

Bahkan dalam penanganan kemiskinan dikeluarkan peraturan berupa Keputusan Gubernur No. 412.6.05/55/2006 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan juga (TKPK). Selain itu di dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Tengah tahun 2005-2025, kemiskinan merupakan salah satu dari *issue* strategis yang mendapat prioritas untuk penanganan pada setiap tahapan pelaksanaannya, oleh sebab itu propinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen yang tinggi dalam usaha menanggulangi masalah kemiskinan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?

2. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengangguran, kemiskinan dan partisipasi politik?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah memperoleh bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran, kemiskinan dan partisipasi politik.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap pengangguran, kemiskinan dan partisipasi politik melalui pertumbuhan ekonomi diharapkan akan bermanfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi Penulis:

Penulis memperoleh tambahan wawasan, pengalaman dan pengetahuan dalam mempraktekan ilmu dan teori yang diperoleh selama kuliah.

2. Bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah:

- a. Memberikan bukti dan pengaruh dari kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah terhadap pengangguran, kemiskinan serta partisipasi politik di daerahnya.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat juga menjadi bahan evaluasi tentang kebijakan keuangan daerah.
3. Bagi Kalangan Akademisi:

Dapat digunakan sebagai acuan dan referensi awal untuk melakukan penelitian selanjutnya bagi para peneliti di bidang kinerja keuangan daerah. Sehingga diharapkan berguna untuk memperluas cakrawala dan tambahan informasi bagi para akademisi guna menemukan dimensi-dimensi baru dalam bidang ilmu keuangan daerah khususnya pengelolaan keuangan daerah.

1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan untuk lebih memfokuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini sehingga pembahasan dan analisis yang akan dilakukan menjadi tepat sasaran. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kinerja keuangan diproksi dengan beberapa rasio keuangan, yaitu: rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio retribusi daerah terhadap PAD, rasio belanja aparatur terhadap total belanja dan rasio belanja publik terhadap total belanja.

2. Penelitian berfokus pada studi tentang Akuntansi, khususnya Sektor Publik, sehingga analisis dan pembahasan yang akan dilakukan diutamakan pada kajian tentang Akuntansi Sektor Publik.
3. Pengambilan data dilakukan di 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Data yang digunakan adalah data pada tahun 2004-2010.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran singkat dan memudahkan pemahaman atas skripsi ini, perlu dijelaskan sistematika penulisan. Berikut ini penulis akan menguraikan secara garis besar penyusunan skripsi dalam perumusannya dituangkan dalam lima bab dengan bagian-bagian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian, meliputi: Pengertian kinerja keuangan, macam-macam rasio keuangan, pengertian pertumbuhan ekonomi, pengertian pengangguran, pengertian kemiskinan dan pengertian partisipasi politik yang cara keseluruhan merupakan variabel dari kinerja ekonomi, sosial dan politik.

BAB III : METODE PENELITIAN

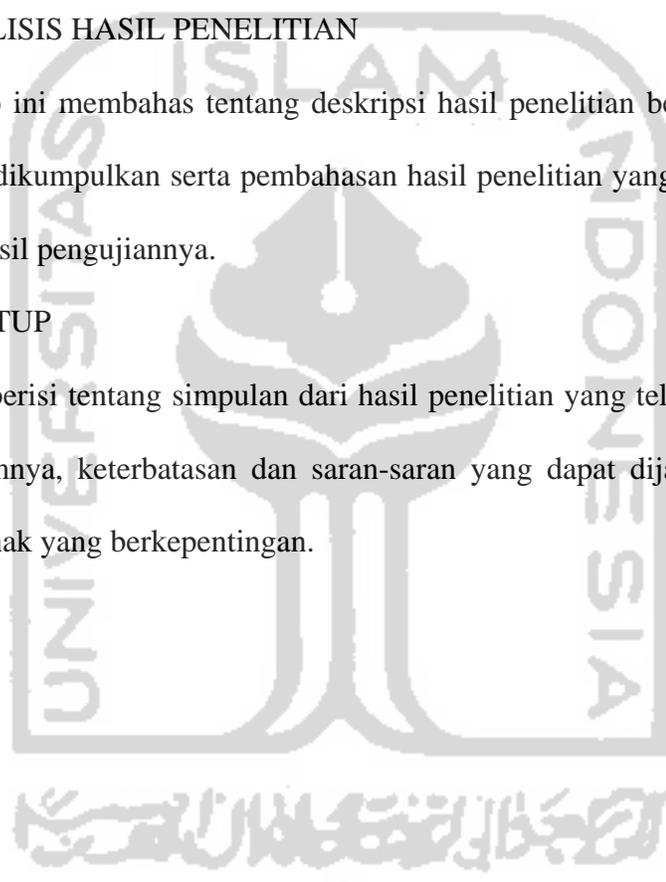
Bab ini menjelaskan tentang Ruang Lingkup Penelitian, Jenis dan Obyek Penelitian, Populasi dan Sampel, Kriteria Sampel, Metode Pengambilan Sampel, Metode Pegumpulan data, Variabel Penelitian, dan Metode Analisis Data.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang deskripsi hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan serta pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dianalisis hasil pengujiannya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kinerja Keuangan

Menurut Hamzah (2008) kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penilaian kinerja didasarkan pada pencapaian yang dapat diperoleh (hasil akhir) dibandingkan dengan rencana yang hendak dicapai. Semakin tinggi tingkat kesesuaian hasil yang diperoleh dengan yang direncanakan maka semakin bagus suatu kinerja.

Menurut Hamzah (2008) kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Menurut Halim (2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Hamzah, 2008).

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka analisis kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi keuangan pada masa sekarang dan kelanjutannya pada masa yang akan datang dan didasarkan pada data-data laporan keuangan.

Sesuai dengan semua uraian di atas maka yang dimaksud dengan kinerja keuangan dalam penelitian ini adalah penilaian pada kondisi keuangan pemerintah daerah yang dapat mencerminkan pemanfaatan sumber daya keuangan (finansial) yang dimiliki dan peluangnya di masa depan dengan dasar data-data yang terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah (APBD).

2.1.2. Indikator Kinerja Keuangan

Sesuai dengan pendapat Hamzah (2008) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan, maka dalam penilaian kinerja keuangan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui berbagai rasio keuangan pemerintah daerah yang merupakan salah satu indikator keuangan.

Rasio-rasio keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Rasio Kemandirian

Menurut Hamzah (2008) Rasio Kemandirian keuangan daerah yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal akan semakin rendah, begitu juga sebaliknya. Dalam penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan formulasi:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Berdasarkan formulasi diatas dapat diketahui bahwa rasio kemandirian menggambarkan sejauhmana tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah dalam membiayai pemerintahannya yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, rasio kemandirian menggambarkan seberapa besar total pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

2. Rasio Efektifitas

Pengertian efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan layanan bagi

masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan, berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya (Hamzah, 2008). Rasio efektifitas diukur dengan:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}}$$

Nilai efektifitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Medi, 1996 dalam Budiarto, 2007). Apabila persentase kinerja keuangan di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif, 90% - 100% dikatakan efektif, 80% - 90% dikatakan cukup efektif, 60% - 80% dikatakan kurang efektif dan kurang dari 60% dikatakan tidak efektif.

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai

hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan (Hamzah, 2008). Rasio efisiensi diukur dengan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Medi, 1966 dalam Budiarto, 2007). Apabila kinerja keuangan diatas 100% dapat dikatakan tidak efisien, 90% - 100% dikatakan kurang efisien, 80% - 90% dikatakan cukup efisien, 60% - 80% dikatakan efisien dan di bawah 60% dikatakan sangat efisien.

4. Rasio Pajak Daerah terhadap PAD

Rasio pajak daerah terhadap PAD mengukur kemampuan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah (Mahsun, 2006). Formula rasio pajak daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pajak Daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}}$$

Berdasarkan formula di atas, dapat diketahui bahwa rasio pajak daerah terhadap PAD menggambarkan sejauhmana kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan daerah. Semakin tinggi pajak daerah maka semakin besar kontribusinya terhadap PAD, begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain rasio ini dapat menjelaskan seberapa besar pendapatan daerah yang bersumber dari pemungutan pajak daerah.

5. Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD

Rasio retribusi daerah terhadap PAD mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah (Mahsun, 2006). Rasio ini diukur dengan formula:

$$\text{Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{PAD}}$$

Berdasarkan formula di atas, dapat diketahui bahwa rasio retribusi daerah terhadap PAD menggambarkan sejauhmana pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan daerah. Semakin tinggi retribusi daerah maka semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam menghasilkan PAD dari retribusi daerah. Dengan kata lain rasio ini dapat menjelaskan seberapa besar pendapatan daerah yang merupakan hasil dari pemungutan retribusi daerah.

6. Rasio Belanja Aparatur terhadap Total Belanja

Rasio belanja aparatur terhadap total belanja dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja aparatur daerah terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah (Mahsun, 2006). Rasio ini diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Aparatur Daerah terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Belanja Aparatur}}{\text{Total Belanja}}$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio belanja aparatur daerah terhadap total belanja menggambarkan seberapa besar persentase dari total belanja daerah yang digunakan untuk belanja aparatur. Jadi semakin besar belanja

aparatur, diharapkan akan semakin meningkat pula kinerja aparatur dalam hal pelayanan terhadap masyarakat.

7. Rasio Belanja Pelayanan Publik terhadap Total Belanja

Rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja berguna untuk mengetahui proporsi belanja pelayanan publik terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Formula rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Pelayanan Publik Daerah terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja}}$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja menggambarkan seberapa besar total belanja daerah yang digunakan untuk membiayai belanja pelayanan publik. Dengan meningkatnya belanja pelayanan publik diharapkan secara langsung berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik yang merupakan hasil dari meningkatnya kinerja pemerintah daerah.

2.1.3. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan Gross Domestic Product (GDP) atau

Gross National Product (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Todaro (1997) secara spesifik menyebutkan ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi, yaitu: akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi.

2.1.4. Pengangguran

Pengertian pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers) atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum bekerja (Putong, 2003).

Penelitian Arthur Okun dalam Putong (2003) mengatakan apabila GNP tumbuh sebesar 2,5% diatas trendnya yang telah dicapai pada tahun tertentu, maka

tingkat pengangguran akan turun sebesar 1%. Jadi $1\%/2,5\% = 0,4\%$. Apabila tingkat pengangguran ingin diturunkan sebesar 2%, maka pertumbuhan ekonomi haruslah dipacu agar bias tumbuh sebesar 5% diatas rata-rata.

Berdasarkan pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. Pengangguran Terselubung (Disguised Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
2. Setengah Menganggur (Under Unemployment) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
3. Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

Macam-macam pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pengangguran Konjungtural (Cycle Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan gelombang (naik turunnya) kehidupan perekonomian/siklus ekonomi.

2. Pengangguran Struktural (Struktural Unemployment) adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan corak ekonomi dalam jangka panjang. Pengangguran struktural bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan, seperti: akibat permintaan berkurang, akibat kemajuan dan penggunaan teknologi serta akibat dari kebijakan pemerintah.
3. Pengangguran Friksional (Frictional Unemployment) adalah pengangguran yang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara pemberi kerja dan pencari kerja. Pengangguran ini sering disebut pengangguran sukarela.
4. Pengangguran Musiman adalah pengangguran yang muncul akibat pergantian musim, misalnya pergantian musim tanam ke musim panen.
5. Pengangguran Teknologi adalah pengangguran yang terjadi akibat perubahan atau penggantian tenaga manusia menjadi tenaga mesin-mesin
6. Pengangguran Siklus adalah pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian (karena terjadi resesi). Pengangguran siklus disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat (aggrerat demand).

2.1.4.1. Sebab-sebab Terjadinya Pengangguran

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah sebagai berikut:

1. Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja. Ketidakseimbangan terjadi apabila jumlah angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja yang tersedia. Kondisi sebaliknya sangat jarang terjadi.
2. Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang, misalnya kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang.

Apabila kesempatan kerja jumlahnya sama atau lebih besar daripada angkatan kerja, pengangguran belum tentu tidak terjadi. Alasannya, belum tentu terjadi kesesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut mengakibatkan sebagian tenaga kerja yang ada tidak dapat mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

3. Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia.
4. Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang.

Jumlah angkatan kerja di suatu daerah mungkin saja lebih besar dari kesempatan kerja, sedangkan di daerah lainnya dapat terjadi keadaan sebaliknya. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan perpindahan tenaga kerja dari suatu daerah ke daerah lain, bahkan dari suatu negara ke negara lainnya.

2.1.4.2. Dampak-dampak Pengangguran terhadap Perekonomian

Untuk mengetahui dampak pengangguran terhadap perekonomian kita perlu mengelompokkan pengaruh pengangguran terhadap dua aspek ekonomi , yaitu:

1. Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian suatu Negara

Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya), oleh karena itu kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah.
- b. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun.

c. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan Investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu.

2. Dampak Pengangguran terhadap Individu yang Mengalaminya dan Masyarakat

Berikut ini merupakan dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan terhadap masyarakat pada umumnya:

- a. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian.
- b. Pengangguran dapat menghilangkan keterampilan.
- c. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.

2.1.4.3. Kebijakan-kebijakan Pengangguran

Adanya bermacam-macam pengangguran membutuhkan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sebagai berikut:

1. Cara Mengatasi Pengangguran Struktural

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah:

- a. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja,

- b. Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan,
- c. Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong, dan
- d. Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran.

2. Cara Mengatasi Pengangguran Friksional

Untuk mengatasi pengangguran secara umum antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut:

- a. Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya,
- b. Deregulasi dan Debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru,
- c. Menggalakkan pengembangan sektor informal, seperti *home industry*,
- d. Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya, dan
- e. Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah, seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain, sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

3. Cara Mengatasi Pengangguran Musiman

Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara:

- a. Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain, dan
- b. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu.

4. Cara mengatasi Pengangguran Siklus

Untuk mengatasi pengangguran jenis ini adalah:

- a. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa, dan
- b. Meningkatkan daya beli masyarakat.

2.1.5. Kemiskinan

2.1.5.1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan menurut Dinas Sosial Jawa Timur didefinisikan dari dua sisi, yaitu sisi ekonomi dan sosial. Dari sisi ekonomi yang berarti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar, sedangkan dari sisi sosial yang berarti ketidakmampuan dalam peran sosial.

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan, baik yang relatif tetap maupun yang berkembang. Faktor relatif tetap misalnya letak geografis dan daya

dukung alam. Faktor yang berkembang berupa keadaan sosial budaya yang menyangkut pengetahuan dan ketrampilan, adat istiadat, situasi politik dan kebijakan penguasa.

Ada beberapa indikator yang menyebabkan orang terperangkap kemiskinan, diantaranya perkembangan di bidang sosial dan ekonomi antara lain pelayanan kesehatan, gizi, pengajaran, perumahan, konsumsi, transportasi dan jasa, pertanian, industri dan perdagangan (Hamzah, 2008).

Menurut Suryawati dalam Annisa (2011), kemiskinan dapat dibedakan menjadi berbagai bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
3. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

4. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Menurut Annisa (2011), kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
2. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Sumber dan Proses Terjadinya Kemiskinan

Menurut Nasikun dalam Annisa (2011), beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:

1. Policy induces processes, yaitu proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, diantaranya adalah kebijakan anti-kemiskinan, tetapi relitanya justru melestarikan kemiskinan.

2. Socio-economic dualism, negara bekas koloni mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. Population growth, perspektif yang didasari oleh teori Malthus, bahwa penambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan pangan seperti deret hitung.
4. Resources management and the environment, adalah unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan produktivitas.
5. Natural cycle and processes, kemiskinan terjadi karena siklus alam. Misalnya tingal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang maksimal dan terus-menerus.
6. The marginalization of woman, peminggiran kaum perempuan karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah dari laki-laki.
7. Cultural and ethnic factors, bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.
8. Exploatif intermediation, keberadaan penolong yang menjadi penodong, seperti rentenir.

9. Internal political fragmentation and civil stratfe, suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.
10. International processes, bekerjanya sistem internasional (kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi miskin.

2.1.5.2. Ukuran Kemiskinan

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi non makanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan).

Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.

Menurut Annisa (2011), tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan.

Daerah pedesaan:

1. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
2. Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
3. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Daerah perkotaan:

1. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
2. Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
3. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin (Criswardani Suryawati dalam Annisa, 2011). Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengukur kemiskinan berdasarkan dua kriteria, yaitu:

1. Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan

dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per 40 orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit.

2. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter per segi per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan.

2.1.6. Partisipasi Politik

Secara umum, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih pimpinan baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini meliputi pemberian suara dalam pemilu atau kepala daerah, menghadiri kegiatan kampanye, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Menurut Meclosky dalam Muryanto dan Irwansyah (2006) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat, dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Partisipasi politik amat *urgen* dalam konteks dinamika perpolitikan di suatu masyarakat. Sebab dengan partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat maka niscaya terwujud segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara *universal*. Sehingga demikian, keikutsertaan individu dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kepentingan umum, dan paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. Dalam artian setiap individu harus menyadari peranan mereka dalam mendirikan kontribusi sebagai insan politik. Dalam hal ini peranan meliputi pemberian suara, kegiatan menghadiri kampanye serta aksi demonstrasi. Namun kegiatan-kegiatan tersebut sudah tentu harus dibarengi rasa sukarela sebagai kehendak spontanitas individu maupun kelompok masyarakat dalam partisipasi politik.

Dengan kegiatan-kegiatan politik ini pula, intensitas daripada tingkat partisipasi politik warga masyarakat dapat termanifestasi, oleh karena itu sikap dan perilaku warga masyarakat dalam kegiatan politik berupa pemberian suara dan kegiatan kampanye dalam pemilihan kepala daerah merupakan parameter dalam mengetahui tingkat kesadaran partisipasi politik warga masyarakat.

Namun demikian sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam partisipasi politik kadang kala mengarah pada sikap apatis, sinisme, dan arogan sehingga yang demikian ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam pemilihan kepala daerah. Yang akhirnya mereka enggan memberikan suara dalam pemilihan dan juga tidak

menghadiri kegiatan-kegiatan politik (kampanye). Fenomena-fenomena ini selalu muncul dimana-mana, terutama dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

2.1.7. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan uraian sebelumnya bahwa kinerja keuangan adalah penilaian pada kondisi keuangan pemerintah daerah yang dapat mencerminkan pemanfaatan sumber daya keuangan (finansial) yang dimiliki dan peluangnya di masa depan dengan dasar data-data yang terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah (APBD). Dengan kata lain, kinerja keuangan daerah merupakan penilaian pada sejauhmana pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam usahanya untuk mencapai tujuan.

Sesungguhnya tujuan akhir yang ingin dicapai dari pengelolaan keuangan daerah adalah pemanfaatan sumber daya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Permendagri No 13/2006 pasal 4 tentang azas umum pengelolaan keuangan).

Peraturan perundang-undangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksudkan sebagai salah satu pelaksanaan dari kerangka dasar sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana tujuan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur, oleh sebab itu yang menjadi tujuan utama adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Salah satu

indikator dari peningkatan kesejahteraan adalah pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan pendapat Harianto dan Adi (2007), tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

2.1.8. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemiskinan, Pengangguran dan Partisipasi Politik melalui Pertumbuhan Ekonomi

Seperti telah diuraikan di atas bahwa kinerja keuangan suatu daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi mampu memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai pendapat Darwanto dan Yustikasari (2007), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* per kapita.

Berdasarkan pendapat tersebut, pertumbuhan ekonomi *regional* menunjukkan jumlah kenaikan pendapatan yang dapat dihasilkan oleh tiap orang dalam suatu wilayah tertentu. Makin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah berarti makin besar pula pendapatan masyarakat, begitu pula sebaliknya jika makin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi daerah berarti makin kecil pula pendapatan masyarakat di daerah tersebut, oleh sebab itu pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dengan kemiskinan, karena naiknya pendapatan secara otomatis akan menyebabkan turunnya kemiskinan.

Menurut Todaro dalam Hamzah (2008) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu: akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan

jumlah angkatan kerja yang dianggap secara positif merangsang pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan pendapat di atas, maka pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif terhadap kenaikan jumlah angkatan kerja, sehingga secara langsung akan mengakibatkan turunnya pengangguran yang terjadi di masyarakat.

Menurut Samego (1999) ada hubungan yang erat dan pengaruh yang positif, kuat dan signifikan antara faktor sosial ekonomi dengan partisipasi politik masyarakat di negara ini, sehingga orang yang sosial ekonominya cukup baik, akan ada keseimbangan antara kepentingan untuk *survive* secara ekonomi dan politik, sehingga hal-hal yang menyangkut politik dan kepentingan bersama juga penting baginya. Adanya anggapan bahwa partisipasi politik dalam pembangunan negara bermanfaat untuk kepentingan bersama, dapat mewujudkan keinginan, kebutuhan dan harapan masyarakat (Irawati, tanpa tahun).

Berdasarkan pendapat tersebut, maka jika terjadi pertumbuhan ekonomi yang mengalami kenaikan maka tingkat sosial ekonomi masyarakat juga makin meningkat dapat menyebabkan partisipasi politik juga mengalami peningkatan. Alasannya karena masyarakat mempunyai penilaian bahwa pemanfaatan sumber daya finansial berorientasi kepada kepentingan masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan dukungan pada berbagai langkah kebijakan yang mendukung pemerintah termasuk diantaranya adalah untuk menyalurkan aspirasi politiknya sehingga terjadi peningkatan partisipasi politik.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007) dengan judul “Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita”. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali. Tahun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2001 sampai tahun 2004. Metode Analisis yang digunakan adalah dengan *Structure Equation Models* (SEM) dengan AMOS (*Analisis of Moments Structure*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Per Kapita.

Penelitian Hamzah (2008) dengan judul “Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2006). Pada penelitian ini sebagai proksi kinerja keuangan adalah rasio kemandirian¹, kemandirian², rasio efektivitas, rasio efisiensi. Sebagai proksi pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan PDRB, pengangguran menggunakan tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan proksi tingkat kemiskinan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur.

Hasil penelitian menunjukkan proksi kinerja keuangan berupa rasio kemandirian¹, rasio kemandirian², dan rasio efisiensi berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan terdapat pengaruh secara positif, sedangkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan terdapat pengaruh secara negatif. Pada pengujian secara tidak langsung antara kinerja keuangan dengan pengangguran dan kemiskinan menunjukkan rasio kemandirian¹, rasio kemandirian², dan rasio efisiensi secara tidak langsung berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

2.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Hubungan Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Otonomi daerah berlaku di Indonesia berdasarkan UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004). Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu untuk mengembangkan daerah tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah, oleh karena itu tiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja keuangannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa yang akan datang. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD.

Brata (2004) menyatakan bahwa terdapat dua komponen penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara regional. Kedua komponen tersebut adalah PAD dan Bagian Sumbangan dan Bantuan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H1: *Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.*

Pengefektifan penerimaan dimaksudkan agar jumlah target penerimaan yang dianggarkan bisa dicapai atau terealisasi. Jadi target penerimaan yang telah dianggarkan menjadi acuan dalam usaha mendapatkan penerimaan daerah. Jumlah penerimaan yang terealisasi dengan target penerimaannya menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan, karena penerimaan daerah tersebut akan digunakan pemerintah daerah dalam mendanai program-programnya, dan tentunya program yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.

Dari perspektif manajemen pemerintah negara modern, adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, yaitu berupa keleluasaan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya, merupakan dari adanya tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan umum (Barzelay, 1991 dalam Sasana 2006). Kesejahteraan umum yang dimaksudkan adalah berupa pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H2: *Kinerja keuangan berupa rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.*

Efisiensi kinerja dapat diukur dengan membandingkan jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran. Maksudnya adalah seberapa efisien pemerintah daerah membelanjakan penerimaan yang telah didapatkan. Karena dana setiap pengeluaran daerah berupa biaya-biaya tersebut memakai dana dari penerimaan. Jika pemerintah daerah tidak bijak dalam menyusun pengeluaran, maka akan terjadi defisit anggaran. Sehingga dari itu akan dilakukan pengurangan program-program kerja, dan imbasnya program kerja yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi akan ikut dikurangi.

Selaras dengan misi dari otonomi daerah yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah dan juga meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat (Barzelay dalam Sasana 2006), maka faktor efisiensi juga berpengaruh terhadap kesejahteraan umum berupa pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut maka dirumuskan hipotesis:

H3: *Kinerja keuangan berupa rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.*

Dengan diterapkannya sistem otonomi daerah maka tiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan pendapatan daerahnya guna menciptakan persaingan yang

sehat yang sehat antar daerah sehingga memicu timbulnya inovasi, oleh karena itu masing-masing daerah berusaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah agar meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam membelanjakan APBD daerahnya.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah. Pemberian kewenangan ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan PAD khususnya yang berasal dari pajak serta retribusi daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

- H4: *Kinerja keuangan berupa rasio pajak daerah terhadap PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.*
- H5: *Kinerja keuangan berupa rasio retribusi daerah terhadap PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.*

Selain dengan meningkatkan PAD dalam rangka mendukung otonomi daerah, pemerintah daerah juga diharapkan mampu menggunakan anggaran belanja secara efisien. Karena pada hakekatnya, tugas dari pemerintah daerah yaitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, oleh karena itu dalam

melakukan belanja daerah, pemerintah daerah harus lebih selektif terutama belanja yang berhubungan secara langsung dengan kinerja aparatur pemerintah daerah, seperti belanja aparatur dan belanja pelayanan publik.

Dengan terpenuhinya belanja tersebut, diharapkan akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah, sehingga tujuan agar pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada publik, akan tercapai dan akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H6: *Kinerja keuangan berupa rasio belanja aparatur terhadap total belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.*

H7: *Kinerja keuangan berupa rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.*

2.3.2. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Partisipasi Politik

Gambaran secara menyeluruh dari kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dengan mengukur dengan tingkat pertumbuhan ekonominya yang kita kenal dengan konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator makro ekonomi. Dalam konsep penghitungan PDRB, yang dihitung adalah nilai bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam wilayah yang diukur. Salah satu aspek untuk melihat kinerja perekonomian

adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan pekerjaan merupakan *concern* dari pembuat kebijakan. Angkatan kerja merupakan jumlah total dari pekerja dan pengangguran, sedangkan pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang menganggur.

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Studi yang dilakukan oleh ekonom Okun mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi (Laporan Perkembangan Ekonomi dan Perbankan Kep. Bangka Belitung Triwulan II, 2006). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H8: *Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran.*

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin (Siregar dan Wahyuniarti dalam Annisa, 2011). Penelitian yang dilakukan Wongdesmiwati (2009), menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan

ekonomi dan tingkat kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Hubungan yang diuraikan di atas menunjukkan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan Siregar dan Wahyuniarti (dalam Annisa, 2011). Dari pemaparan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari tingkat kemakmuran warga masyarakatnya. Dengan kata lain, dalam konteks makro asumsi yang dapat dibangun bahwa sebuah negara yang makmur, tentunya perwujudan demokrasi di negara tersebut akan cenderung lebih baik.

Lipset dan Deutsch (dalam Annisa, 2011) menyatakan: “Terdapat suatu keyakinan bahwa demokrasi baru akan berjalan dengan baik kalau ditopang oleh kondisi sosio-ekonomi yang kuat. Terutama dilihat dari besar-kecilnya pendapatan per kapita masyarakat”. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H9: *Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.*

Pengaruh tingkat ekonomi individu di dalam masyarakat sebagai unsur pembentukan partisipasi politik individu tersebut dalam konteks mikro mempunyai korelasi antara keduanya. Surbakti (2003) menyatakan: “Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki

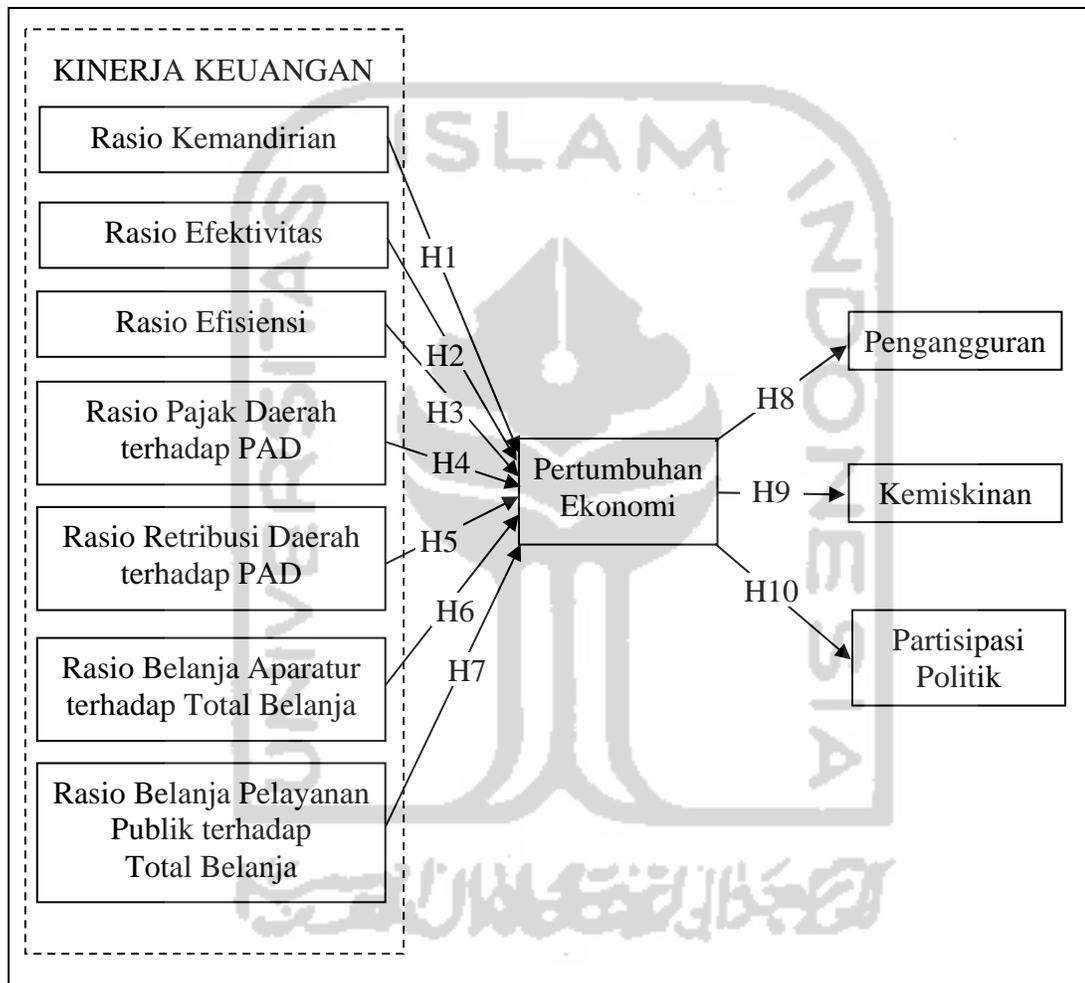
pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah”. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis:

H10: *Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap partisipasi politik.*



2.4. Kerangka Hipotesis

Berdasarkan pada semua uraian di atas maka kerangka hipotesis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Hipotesis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2005) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan pendapat tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah selama periode 2004 sampai dengan 2010.

Menurut Sugiyono (2005) sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Berdasarkan pendapat tersebut maka sampel dalam penelitian ini adalah sebagian dari Kabupaten dan Kota di wilayah Propinsi Jawa Tengah selama periode 2004 sampai dengan 2010.

Menurut Sugiyono (2005) teknik *sampling* adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Berdasarkan pengertian tersebut, maka teknik *sampling* adalah pengambilan bagian sampel dalam penelitian dari populasinya. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *non-probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Metode sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2005). Pertimbangan tersebut meliputi:

1. Kabupaten atau Kota tersebut sudah merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah selama periode penelitian.
2. Kabupaten atau Kota tersebut sudah mempublikasikan laporan keuangan baik itu berupa Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja (APBD) selama periode penelitian.
3. Kabupaten atau Kota tersebut sudah memiliki data-data historis tahunan yang diperlukan dalam penelitian ini (yaitu: PDRB, Kemiskinan, Pengangguran dan Partisipasi Politik).

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan tema dalam penelitian ini (yaitu mengenai: Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, dan Partisipasi Politik), baik itu yang berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan literatur-literatur lain yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Selain dokumen-dokumen yang telah disebutkan di atas, penelitian ini juga mengumpulkan data tentang publikasi-publikasi yang terkait langsung dengan pokok

bahasan dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (APBD), Data-data statistik tahunan, dan Laporan KPU.

Berdasarkan uraian di atas maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, karena semua data-data tersebut diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya atau melalui media perantara baik itu yang merupakan publikasi ataupun media yang lain. Sesuai dengan pendapat Sugiyono (2005), yang menyatakan bahwa, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

3.3. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

3.3.1. Variabel Kinerja Keuangan

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Hamzah (2008) bahwa kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan, dan pendapat Halim (2001) analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia (Hamzah, 2008), maka untuk melakukan pengukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini digunakan proksi rasio-rasio keuangan yang terdiri dari:

1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dibandingkan dengan jumlah pendapatan daerah. Formula rasio kemandirian adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Sesuai dengan formulasi tersebut maka nilai Pendapatan Daerah dan Total Pendapatan diperoleh dari laporan Realisasi Penerimaan Pemda Kabupaten/Kota.

2. Rasio Efektifitas

Rasio efektivitas dalam penelitian ini diukur dengan efektivitas PAD. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai 1 atau 100%. (Mahmudi dalam Annisa, 2011). Formulasi rasio ini, yaitu:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}}$$

Sesuai dengan formulasi diatas, nilai Realisasi dan Target Penerimaan PAD di peroleh dari Laporan Realisasi Pemda Kabupaten/Kota. Nilai target tersebut di peroleh dari PAD tahun lalu, karena dengan melihat realisasi di masa yang lalu maka pemerintah dapat menentukan target di masa yang akan datang.

3. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi dalam penelitian ini adalah rasio efisiensi PAD. Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektivitas PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektivitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien, oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD (Mahmudi dalam Annisa, 2011). Formulasinya adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

Berdasarkan formulasi di atas, nilai dari Realisasi Pengeluaran dan Realisasi Penerimaan diperoleh dari laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah.

4. Rasio Pajak Daerah terhadap PAD

Rasio pajak daerah terhadap PAD mengukur kemampuan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah (Mahsun, 2006). Formula rasio pajak daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pajak Daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}}$$

Berdasarkan formulasi di atas, nilai dari Pajak Daerah diperoleh dari laporan Laporan Realisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD

Rasio retribusi daerah terhadap PAD mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah (Mahsun, 2006). Rasio ini diukur dengan formula:

$$\text{Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{PAD}}$$

Berdasarkan formulasi di atas, nilai dari Retribusi Daerah diperoleh dari laporan Laporan Realisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

6. Rasio Belanja Aparatur terhadap Total Belanja

Rasio belanja aparatur terhadap total belanja dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja aparatur daerah terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah (Mahsun, 2006). Rasio ini diukur dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Aparatur Daerah terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Belanja Aparatur}}{\text{Total Belanja}}$$

Berdasarkan formulasi di atas, nilai dari Belanja Aparatur dan Total Belanja diperoleh dari Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Pembangunan Daerah. Karena ada perubahan kebijakan (Permendagri 13 tahun 2006) tentang sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah maka dari tahun 2007 terjadi perubahan struktur belanja dalam APBD yang semula Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik berubah menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Oleh sebab itu Belanja aparatur pada periode tahun 2007 sampai dengan 2010 perlu untuk disesuaikan.

Penyesuaian yang dilakukan adalah dengan memasukkan komponen-komponen Belanja Aparatur pada Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

7. Rasio Belanja Pelayanan Publik terhadap Total Belanja

Rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja berguna untuk mengetahui proporsi belanja pelayanan publik terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah (Mahsun, 2006). Formula rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Pelayanan Publik Daerah terhadap Total Belanja} = \frac{\text{Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja}}$$

Berdasarkan formulasi di atas, nilai dari Belanja Pelayanan Publik dan Total Belanja diperoleh dari Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Pembangunan Daerah.

3.3.2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuncoro (dalam Annisa, 2011) pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pembangunan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Peningkatan produktivitas seluruh perekonomian merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan.

Adapun pertumbuhan ekonomi (dalam konteks daerah) maupun pendapatan perkapita, dihitung dengan formulasi sebagai berikut (Kuncoro, 2004):

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRBt} - \text{PDRBt} - 1}{\text{PDRBt} - 1} \times 100\%$$

PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan 2000, yang didapatkan dari data tahunan BPS.

3.3.3. Variabel Pengangguran

Pengangguran merupakan keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya (Sukirno, 2004). Dalam penelitian ini, data pengukuran pengangguran digunakan adalah data persentase jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota.

3.3.4. Variabel Kemiskinan

Menurut Annisa (2011), kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana sekelompok orang memiliki pendapatan yang tidak cukup dan kemampuan yang terbatas dalam mempertahankan hidup. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Data kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data persentase penduduk miskin yang didapat dari data tahunan BPS.

3.3.5. Variabel Partisipasi Politik

Menurut Meclosky dalam Muryanto dan Irwansyah (2006) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat, dimana

mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Data partisipasi politik yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase jumlah penduduk Jawa Tengah yang ikut berpartisipasi dalam pemilu Persiden untuk periode 2004 dan 2009 yang datanya didapat dari data pemilu KPU.

3.4. Teknik Analisis Data

3.4.1. Pengujian dengan Metode PLS

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan, diuji dengan menggunakan *partial least-square (PLS)*. Penggunaan PLS cocok untuk memprediksi dan membangun teori dan sampel yang dibutuhkan relatif kecil, minimal 10 kali item dalam konstruk yang paling kompleks (Ghozali, 2006). Keuntungan lain menggunakan PLS adalah PLS dapat mengestimasi ukuran pada model validitas dan reliabilitas, serta menggunakan indikator konstruk laten. PLS menghasilkan parameter dari model struktural yang menguji kekuatan dari hubungan yang menguji kekuatan dari hubungan yang dihipotesiskan.

Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pengujian satu sisi (*one tail*). Sesuai dengan penelitian Aty Herawati (2008), nilai kritis untuk penelitian satu sisi (*one tali*) yaitu sebesar $T \text{ hitung} < 1.64$, sehingga dapat di tetapkan kriteria hipotesis sebagai berikut:

Jika $T_{\text{Hitung}} < 1.64$, maka Hipotesis ditolak

Jika $T_{\text{Hitung}} > 1.64$, maka Hipotesis diterima



BAB IV

ANALISIS DATA

4.1. Sampel Penelitian

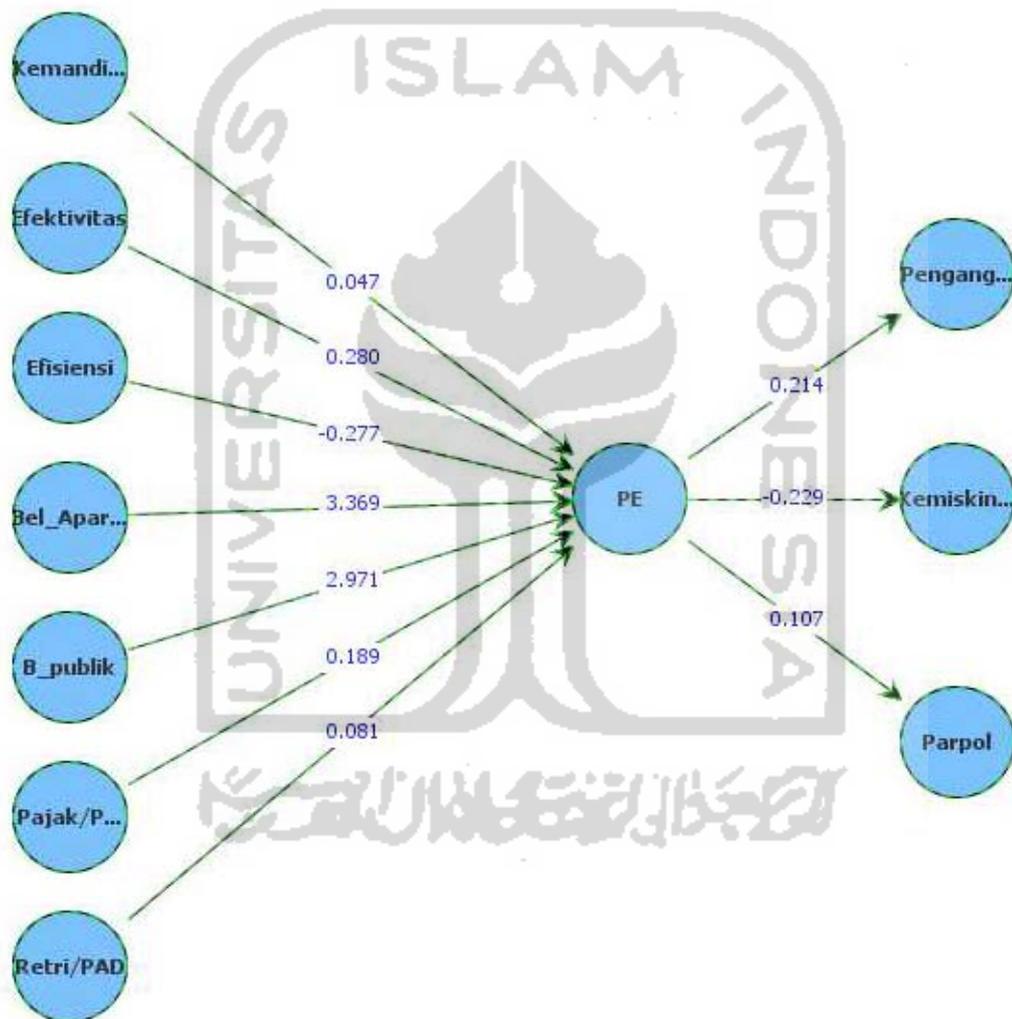
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota (Pemerintah Daerah Tingkat II atau pemerintah daerah yang setingkat dengannya) di seluruh Indonesia. Dalam Penelitian ini studi hanya dilakukan pada 35 Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah, yaitu 29 (dua puluh sembilan kabupaten) yang meliputi: Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes, serta 6 (enam) kota yaitu; Magelang, Surakarta, Salatiga, Semarang, Pekalongan, dan Tegal. Oleh sebab itu, sesuai dengan rincian tersebut jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota.

Dengan mempertimbangkan periode penelitian yang selama periode 2004 sampai dengan 2010 maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 (tujuh puluh) Kabupaten dan Kota. Hal ini disebabkan karena banyak bagian dari populasi yang tidak memenuhi syarat sebagai sampel dalam penelitian ini. Hal ini disebabkan terutama karena memang data partisipasi politik yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan jumlah penduduk daerah

(Kabupaten/Kota) yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Presiden Tahun 2004 dan 2009.

4.2. Analisis Data dengan PLS

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan PLS, maka hubungan masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Hasil Pengujian dengan PLS

4.3. Hasil Pengujian Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan *SMART PLS*, maka hasil pengujian semua hipotesis dalam penelitian ini dapat disajikan seperti pada Tabel 4.1 sampai dengan 4.10 berikut ini:

H1: Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.1

Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Pengaruh Antar Variabel	Original Sample Estimate	Mean of Subsamples	Standard Deviation	T Statistic	Keterangan Pengujian
Kemandirian → PE	0.047	0.136	0.552	0.086	Hipotesis Ditolak

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan PLS

Berdasarkan hasil *output* PLS di atas maka pengaruh antara rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Kemandirian → PE) memperoleh nilai *T Statistics* sebesar 0.086 yang lebih kecil dari nilai kritisnya yaitu 1.64 ($0.086 < 1.64$). Oleh sebab itu, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Kinerja Keuangan yang berupa rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi, ditolak. Artinya, tidak

terdapat pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Kemandirian terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H2: Kinerja keuangan berupa rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Hipotesis Ke-Dua

Pengaruh Antar Variabel	Original Sample Estimate	Mean of Subsamples	Standard Deviation	T Statistic	Keterangan Pengujian
Efektivitas → PE	0.28	0.201	0.166	1.681	Hipotesis Diterima

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan PLS

Berdasarkan hasil *output* PLS di atas maka pengaruh antara Kinerja Keuangan yang berupa Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Rasio Efektivitas → PE) memperoleh nilai *T Statistics* sebesar 1.681 yang lebih besar dari nilai kritisnya yaitu 1.64 ($1.681 > 1.64$). Oleh sebab itu, dalam pengujian ini mendapatkan hasil terdapat pengaruh yang signifikan antara Kinerja Keuangan yang berupa Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil pengujian ini memperoleh nilai *original samples estimates* sebesar 0.28 yang merupakan koefisien jalur pengaruh antara Kinerja Keuangan yang

berupa Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Rasio Efektivitas → PE) yang bernilai positif. Artinya, terdapat pengaruh positif yang signifikan Kinerja Keuangan yang berupa Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sesuai hasil tersebut maka hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran, diterima.

Sesuai hasil tersebut maka terdapat pengaruh positif yang signifikan Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Artinya, jika efektivitas (naik) maka pertumbuhan ekonomi juga (naik) dan jika efektivitas (turun) maka pertumbuhan ekonomi juga (turun).

H3: Kinerja keuangan berupa rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.3

Hasil Pengujian Hipotesis Ke-Tiga

Pengaruh Antar Variabel	Original Sample Estimate	Mean of Subsamples	Standard Deviation	T Statistic	Keterangan Pengujian
Efisiensi → PE	-0.277	-0.36	0.616	0.449	Hipotesis Ditolak

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan PLS

Berdasarkan hasil *output* PLS di atas maka pengaruh antara Rasio Efisiensi terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Efisiensi \rightarrow PE) memperoleh nilai *T Statistics* sebesar 0.499 yang lebih kecil dari nilai kritisnya yaitu 1.64 ($0.499 < 1.64$). Oleh sebab itu, dalam pengujian hipotesis ini mendapatkan hasil bahwa hipotesis ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Kinerja Keuangan yang berupa Rasio Efektivitas terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

H4: Kinerja keuangan berupa rasio pajak daerah terhadap PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.4
Hasil Pengujian Hipotesis Ke-Empat

Pengaruh Antar Variabel	Original Sample Estimate	Mean of Subsamples	Standard Deviation	T Statistic	Keterangan Pengujian
Pajak/PAD \rightarrow PE	0.189	0.205	0.109	1.74	Hipotesis Diterima

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan PLS

Berdasarkan hasil *output* PLS di atas maka pengaruh antara Kinerja Keuangan yang berupa Rasio Pajak Daerah terhadap PAD jika dihubungkan dengan Pertumbuhan Ekonomi (Rasio Pajak Daerah terhadap PAD \rightarrow PE)

memproleh nilai *T Statistics* sebesar 1.74 yang lebih besar dari nilai kritisnya yaitu 1.64 ($1.74 > 1.64$). Oleh sebab itu, dalam pengujian ini mendapatkan hasil terdapat pengaruh yang signifikan antara Kinerja Keuangan yang berupa Rasio Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Hasil pengujian ini memproleh nilai *original samples estimates* sebesar 0.189 yang merupakan koefisien jalur pengaruh antara Kinerja Keuangan yang berupa Rasio Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Rasio Pajak Daerah → PE) yang bernilai positif. Artinya, terdapat pengaruh positif yang signifikan Kinerja Keuangan yang berupa Rasio Pajak Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Sesuai hasil tersebut maka hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Rasio Keuangan yang berupa pajak daerah terhadap PAD jika dihubungkan dengan Pertumbuhan, diterima.

Sesuai hasil tersebut maka terdapat pengaruh positif yang signifikan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran. Artinya, jika pajak daerah (naik), maka pertumbuhan ekonomi (naik). Namun jika pajak daerah (turun) maka pertumbuhan ekonomi juga (turun).

H5: Kinerja keuangan berupa rasio retribusi daerah terhadap PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

Tabel 4.5

Hasil Pengujian Hipotesis Ke-Lima

Pengaruh Antar Variabel	Original Sample Estimate	Mean of Subsamples	Standard Deviation	T-Statistic	Keterangan Pengujian
Retri/PAD → PE	0.081	0.012	0.096	0.849	Hipotesis Ditolak

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan PLS

Berdasarkan hasil *output* PLS di atas maka pengaruh antara Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD jika dihubungkan dengan Pertumbuhan Ekonomi (Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD → PE) memperoleh nilai *T Statistics* sebesar 0.849 yang lebih kecil dari nilai kritisnya yaitu 1.64 ($0.849 < 1.64$). Oleh sebab itu, dalam pengujian hipotesis ini mendapatkan hasil bahwa hipotesis ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD jika dihubungkan dengan Pertumbuhan Ekonomi.

H6: Kinerja keuangan berupa rasio belanja aparatur terhadap total belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.6

Hasil Pengujian Hipotesis Ke-Enam

Pengaruh Antar Variabel	Original Sample Estimate	Mean of Subsamples	Standard Deviation	T Statistic	Keterangan Pengujian
Bel_Aparatur → PE	3.369	4.471	2.756	1.222	Hipotesis Ditolak

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan PLS

Berdasarkan hasil *output* PLS di atas maka pengaruh antara Rasio Belanja Aparatur terhadap Total Belanja jika dihubungkan dengan Pertumbuhan Ekonomi (Rasio Belanja Aparatur terhadap Total Belanja Daerah → PE) memperoleh nilai *T Statistics* sebesar 1.222 yang lebih kecil dari nilai kritisnya yaitu 1.64 ($1.222 < 1.64$). Oleh sebab itu, dalam pengujian hipotesis ini mendapatkan hasil bahwa hipotesis ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Belanja Aparatur terhadap Total Belanja jika dihubungkan dengan Pertumbuhan Ekonomi.

H7: Kinerja keuangan berupa rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4.7

Hasil Pengujian Hipotesis Ke-Tujuh

Pengaruh Antar Variabel	Original Sample Estimate	Mean of Subsamples	Standard Deviation	T Statistic	Keterangan Pengujian
B_publik → PE	2.971	4.012	2.758	1.077	Hipotesis Ditolak

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan PLS

Berdasarkan hasil *output* PLS di atas maka pengaruh antara Rasio Belanja Pelayanan Publik terhadap Total Belanja jika dihubungkan dengan Pertumbuhan Ekonomi (Rasio Belanja Pelayanan Publik terhadap Total Belanja → PE) memperoleh nilai *T Statistics* sebesar 1.077 yang lebih kecil dari nilai kritisnya yaitu 1.64 ($1.077 < 1.64$). Oleh sebab itu, dalam pengujian hipotesis ini mendapatkan hasil bahwa hipotesis ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh Kinerja Keuangan berupa Rasio Belanja Pelayanan Publik terhadap Total Belanja jika dihubungkan dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan ketujuh hipotesis tersebut maka besarnya *R-square* pada pengaruh masing-masing variabel terhadap Pertumbuhan Ekonomi, adalah sebesar 0.37. Artinya, Kinerja keuangan yang terdiri dari tujuh variabel (Rasio

Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pajak Daerah terhadap PAD, Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD, Rasio Belanja Aparatur terhadap Total Belanja, dan Rasio Belanja Pelayanan Publik terhadap Total Belanja), hanya mampu memberikan penjelasan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 33.7%.

H8: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Pengangguran.

Tabel 4.8
Hasil Pengujian Hipotesis Ke-Delapan

Pengaruh Antar Variabel	Original Sample Estimate	Mean of Subsamples	Standard Deviation	T-Statistic	Keterangan Pengujian
PE → Pengangguran	0.214	0.207	0.107	1.992	Hipotesis Ditolak

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan PLS

Berdasarkan hasil *output* PLS di atas maka pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran (PE → Pengangguran) memperoleh nilai *T Statistics* sebesar 1.992 yang lebih besar dari nilai kritisnya yaitu 1.64 ($1.992 > 1.64$). Oleh sebab itu, dalam pengujian ini mendapatkan hasil terdapat pengaruh yang signifikan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran.

Hasil pengujian ini memperoleh nilai *original samples estimates* sebesar **0.214** yang merupakan koefisien jalur pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran (PE → Pengangguran) yang bernilai positif. Artinya, terdapat pengaruh positif yang signifikan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran. Sesuai hasil tersebut maka hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran, ditolak.

Sesuai hasil tersebut maka terdapat pengaruh positif yang signifikan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi (naik) maka pengangguran (naik) dan jika pertumbuhan ekonomi (turun) maka pengangguran juga (turun).

Berdasarkan pengujian hipotesis tersebut maka besarnya *R-square* pada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran adalah sebesar 0.046. Artinya, Pertumbuhan Ekonomi hanya mampu memberikan penjelasan terhadap Pengangguran sebesar 4.6%.

H9: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan.

Tabel 4.9

Hasil Pengujian Hipotesis Ke-Sembilan

Pengaruh Antar Variabel	Original Sample Estimate	Mean of Subsamples	Standard Deviation	T-Statistic	Keterangan Pengujian
PE → Kemiskinan	-0.229	-0.222	0.095	2.399	Hipotesis Diterima

Sumber: Data Sekunder yang diolah dengan PLS

Berdasarkan hasil *output* PLS di atas maka pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan (PE → Kemiskinan) memperoleh nilai *T Statistics* sebesar 2.399 yang lebih besar dari nilai kritisnya yaitu 1.64 ($2.399 > 1.64$). Oleh sebab itu, dalam pengujian ini mendapatkan hasil terdapat pengaruh yang signifikan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan.

Hasil pengujian ini memperoleh nilai *original samples estimates* sebesar -0.229 yang merupakan koefisien jalur pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan (PE → Kemiskinan) yang bernilai negatif. Artinya, terdapat pengaruh negatif yang signifikan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan. Sesuai hasil tersebut maka hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan, diterima.

Sesuai hasil tersebut maka terdapat pengaruh negatif yang signifikan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan. Artinya, jika pertumbuhan ekonomi (naik) maka kemiskinan (turun) dan jika pertumbuhan ekonomi (turun) maka kemiskinan akan (naik).

Berdasarkan pengujian hipotesis tersebut maka besarnya *R-square* pada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan adalah sebesar 0.052. Artinya, Pertumbuhan Ekonomi hanya mampu memberikan penjelasan terhadap Kemiskinan sebesar 5.2%.

H10: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap Partisipasi Politik.

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Hipotesis Ke-Sepuluh

Pengaruh Antar Variabel	Original Sample Estimate	Mean of Subsamples	Standard Deviation	T-Statistic	Keterangan Pengujian
PE → Parpol	0.107	0.137	0.14	0.759	Hipotesis Ditolak

Sumber Data Sekunder yang diolah dengan PLS

Berdasarkan hasil *output* PLS di atas maka pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Partisipasi Politik (PE → Partisipasi Politik) memperoleh nilai

T Statistics sebesar 0.759 yang lebih kecil dari nilai kritisnya yaitu 1.64 ($0.759 < 1.64$). Oleh sebab itu, dalam pengujian hipotesis ini mendapatkan hasil bahwa hipotesis ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Partisipasi Politik.

Berdasarkan pengujian hipotesis tersebut maka besarnya *R-square* pada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran adalah sebesar 0.011. Artinya, Pertumbuhan Ekonomi hanya mampu memberikan penjelasan terhadap Pengangguran sebesar 1.1%.

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Original Sample Estimate	T-Hitung	T-Tabel	Kesimpulan
H1: Rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	0.04	0.086	1.64	Hipotesis Ditolak
H2: Rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	0.28	1.681	1.64	Hipotesis Diterima
H3: Rasio efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	-0.277	0.449	1.64	Hipotesis Ditolak
H4: Rasio pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan ekonomi	0.189	1.74	1.64	Hipotesis Diterima

H5: Rasio retribusi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	0.081	0.849	1.64	Hipotesis Ditolak
H6: Rasio belanja aparatur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	3.369	1.222	1.64	Hipotesis Ditolak
H7: Rasio belanja pelayanan publik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	2.971	1.077	1.64	Hipotesis Ditolak
H8: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengangguran	0.214	1.992	1.64	Hipotesis Ditolak
H9: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan	-0.0229	2.399	1.64	Hipotesis Diterima
H10: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap partisipasi politik	0.107	0.759	1.64	Hipotesis Ditolak

4.4. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan *SMART PLS* dan pengujian hipotesis seperti yang diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat disusun pembahasan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sesuai dengan hasil penelitian maka Rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hamzah, 2008), sehingga jika efektivitas kinerja keuangan mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan pula. Artinya jika terjadi efektivitas kinerja keuangan yang ditunjukkan dengan adanya kesesuaian antara target dan realisasi APBD maka pemerintah daerah akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah mampu memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target yang ingin dicapai. Sesuai dengan pendapat Mahmudi dalam Annisa (2011) yang menyatakan bahwa rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Pajak Daerah terhadap PAD berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sehingga jika Rasio Pajak Daerah terhadap PAD mengalami kenaikan maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami kenaikan pula. Artinya jika pemerintah daerah mampu meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dari pajak maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Hal ini disebabkan karena dengan meningkatnya pendapatan yang dihasilkan Pemerintah Daerah, maka semakin besar sumber daya atau dalam hal ini adalah pendapatan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan pendapat Brata (2004), yang menyatakan bahwa terdapat dua komponen

penerimaan daerah yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara regional, yaitu: PAD serta sumbangan dan bantuan.

Kedua hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang ditinjau dengan rasio efisiensi dan pajak daerah terhadap PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kinerja keuangan yang ditinjau dengan rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio retribusi daerah terhadap PAD, rasio belanja aparatur terhadap total belanja dan rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja, tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat disebabkan karena: masih tingginya ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat. Masih rendahnya efisiensi pemanfaatan APBD, masih rendahnya manfaat ekonomi yang diperoleh oleh masyarakat dari belanja aparatur dan belanja pelayanan publik, serta masih rendahnya kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Daerah.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Partisipasi Politik

Sesuai dengan hasil penelitian maka pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pengangguran, sehingga jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka tingkat pengangguran juga akan mengalami peningkatan. Artinya, jika pemerintah daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka justru tingkat pengangguran yang terjadi di masyarakat akan mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamzah

(2008), yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran.

Hasil penelitian ini dapat dijelaskan dengan adanya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pemanfaatan teknologi. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka otomatis tingkat pemanfaatan teknologi makin meningkat dan secara tidak langsung akan meningkatkan pengangguran yang terjadi. Misalnya: dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin banyak perusahaan yang mampu membeli mesin baru untuk proses produksinya karena dianggap mesin-mesin tersebut lebih ekonomis dan efisien maka akan terjadi pemecatan pegawai secara besar-besaran, yang akhirnya akan menambah jumlah pengangguran.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sehingga jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Artinya jika pemerintah daerah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat akan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wongdesmiwati (2009), yang mendapatkan hasil bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pendapat Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita. Oleh sebab itu kenaikan *output* perkapita yang terjadi mampu menurunkan tingkat kemiskinan karena dengan naiknya *ouput* perkapita otomatis masyarakat akan semakin makmur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap partisipasi politik. Artinya partisipasi politik masyarakat (keikutsertaan masyarakat dalam pemilu) tidak ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pendapat Samego (1999) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang erat dan pengaruh yang positif, kuat dan signifikan antara faktor sosial ekonomi dengan partisipasi politik. Perbedaan hasil penelitian ini dapat disebabkan karena rendahnya partisipasi politik pada objek penelitian ini. Hal ini sesuai dengan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD, 2009), yang menyatakan bahwa terjadi penurunan tingkat partisipasi masyarakat Jawa Tengah pada dua periode pilpres. Pada tahun 2004 tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres di Jawa Tengah sebesar 76.96%, kemudian menurun menjadi 71.01 % pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilpres di Jawa Tengah semakin menurun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pengangguran, kemiskinan serta partisipasi politik melalui pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota dengan menggunakan *SMART PLS* diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil pengujian secara langsung antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan rasio efektivitas dan rasio rasio pajak daerah terhadap PAD berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio kemandirian, rasio efisiensi, rasio retribusi daerah terhadap PAD, rasio belanja aparatur terhadap total belanja dan rasio belanja publik terhadap total belanja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk pengujian secara langsung pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran menunjukkan adanya pengaruh positif secara signifikan. Untuk pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan terdapat pengaruh negatif yang signifikan. Sedangkan untuk pengujian pertumbuhan ekonomi, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik.
3. Pada pengujian secara tidak langsung antara kinerja keuangan dengan kemiskinan, menunjukkan rasio efektivitas dan rasio pajak daerah terhadap

PAD tidak langsung berpengaruh terhadap pengangguran dan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian yang ingin dicapai, antara lain:

1. Dalam penelitian ini pengukuran partisipasi politik menggunakan data jumlah pemilih pada pemilu presiden yang penyelenggaraannya tidak dilaksanakan tiap tahun (5 tahun sekali), sehingga terdapat keterbatasan dalam kolektivitasnya.
2. Model dalam penelitian ini hanya mampu memberikan penjelasan yang lemah pada pengaruh kinerja keuangan terhadap pengangguran, kemiskinan serta partisipasi politik. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sampel yang digunakan.

5.3. Saran

Dari hasil kesimpulan serta keterbatasan penelitian, maka saran yang diberikan antara lain:

1. Bagi penelitian selanjutnya perlu menambah, mengurangi atau mengganti variabel-variabel lain yang dimungkinkan relevan dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan serta partisipasi politik.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih banyak serta menggunakan indikator yang lebih tepat dalam pengukuran partisipasi politik sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Amin, Muryanto dan Irwansyah, Bobby. 2006. Hubungan Tingkat Ekonomi terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Etnis Tionghoa pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung 2005 Kota Medan di Lingkungan VI kelurahan Pusat Pasar Medan Kecamatan Medan Kota. *Jurnal Wawasan*. Vol. 12 No. 1.
- Annisa, Ghina Rufaidah. 2011. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan Kemiskinan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Antiseden. (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah di Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Timur).
- Arsyad, Lincoln. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Edisi Pertama. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Budiarto, Bambang. 2007. Pengukuran Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah. Seminar Ekonomi Daerah. Surabaya.
- Fachruzzaman dan Norman, 2010. Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bengkulu. Simposium Nasional Akuntansi XIII.
- Ghozali, Imam. 2006. Statistik Multivariat SPSS. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gujarati, Damodar, N. 1998. Basic Econometrics, International Edition. Published by Prentice- Hall International, Inc.
- Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Hamzah, Ardi. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan : pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006. Simposium Nasional Akuntansi XI.
- Haryanto, David dan Adi, Priyo Hari. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Nelanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita, *Jurnal SNA X* Makasar.
- Irawati, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pembangunan Nagari (Suatu Kajian Dalam Kebijakan Program Dana Alokasi Umum Nagari di Kenagarian Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Propinsi Sumatera Barat).
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. Ekonomi Pembangunan. Edisi Ketiga. Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- _____. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mahsun, Mohammad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Putong, Iskandar. 2003. Ekonomi Mikro dan Makro. Edisi 2. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.

PPA-LPA FE. UNDIP. Semarang.

Saragih. 2005. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sasana, Hadi. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia dan Filipina. Tugas Akhir.

Setiaji, Wirawan dan Adi, Priyo Hari. 2007. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). Simposium Nasional Akuntansi X.

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta, Bandung.

Tisna, Deny A., 2008, Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran terhadap tingkat Kemiskinan di Indonesia tahun 2003-2004. Kumpulan Skripsi UNDIP. Semarang.

Todaro, MP. 1997. Economic Development. Sixth Edition. Published by New York University.

www.pamekasan.bps-jateng.go.id

www.wikipedia.com

www.bpk.go.id

www.depkeu.go.id



LAMPIRAN 1

REKAPITULASI DATA PENELITIAN

No	Kab/Kota	PAD 04	TOT PENDAPATAN 04	REALISASI PAD 04	TARGET PAD 04
1	Kab. Cilacap	53,499,094	553,424,551	53,499,094	48,301,124
2	Kab. Banyumas	51,224,308	516,693,407	51,224,308	45,298,682
3	Kab. Purbalingga	29,770,847	372,501,555	29,770,847	28,300,571
4	Kab. Banjarnegara	30,290,429	397,115,066	30,290,429	25,303,143
5	Kab. Kebumen	26,264,663	453,921,251	26,264,663	60,223,581
6	Kab. Purworejo	21,837,817	381,549,153	21,837,817	21,882,953
7	Kab. Wonosobo	23,869,513	379,520,761	23,869,513	24,385,836
8	Kab. Magelang	43,416,110	423,450,491	43,416,110	35,808,180
9	Kab. Boyolali	36,970,682	413,593,384	36,970,682	32,781,305
10	Kab. Klaten	27,177,368	521,279,938	27,177,368	22,528,944
11	Kab. Sukoharjo	20,873,147	365,774,471	20,873,147	19,929,270
12	Kab. Wonogiri	29,254,390	438,618,754	29,254,390	26,118,679
13	Kab. Karanganyar	24,730,323	363,553,293	24,730,323	25,196,919
14	Kab. Sragen	43,547,106	398,757,706	43,547,106	42,976,692
15	Kab. Grobogan	42,482,681	477,524,085	42,482,681	37,296,066
16	Kab. Blora	30,361,171	402,824,797	30,361,171	28,388,614
17	Kab. Rembang	18,715,702	287,723,442	18,715,702	17,661,540
18	Kab. Pati	55,030,349	459,117,913	55,030,349	40,826,750
19	Kab. Kudus	42,727,760	334,060,526	42,727,760	38,501,543
20	Kab. Jepara	47,883,517	369,329,109	47,883,517	53,740,237
21	Kab. Demak	17,461,372	384,376,935	17,461,372	25,343,498
22	Kab. Semarang	44,634,644	389,931,132	44,634,644	40,316,572
23	Kab. Temanggung	19,044,705	335,340,254	19,044,705	18,580,064
24	Kab. Kendal	31,893,477	473,156,816	31,893,477	36,631,867
25	Kab. Batang	23,610,803	347,513,390	23,610,803	23,308,568
26	Kab. Pekalongan	23,261,853	326,297,893	23,261,853	22,734,767
27	Kab. Pemasang	24,433,202	405,560,095	24,433,202	28,982,706
28	Kab. Tegal	41,917,522	449,131,544	41,917,522	41,182,073
29	Kab. Brebes	23,162,578	475,356,794	23,162,578	25,288,377
30	Kota Magelang	22,285,171	195,845,745	22,285,171	23,567,460
31	Kota Surakarta	59,026,921	35,506,479	59,026,921	54,815,684
32	Kota Salatiga	21,619,398	190,533,868	21,619,398	19,681,946
33	Kota Semarang	155,825,000	671,653,985	155,825,000	143,157,296
34	Kota Pekalongan	15,864,596	184,835,687	15,864,596	13,679,476

35	Kota Tegal	42,359,747	289,887,994	42,359,747	35,147,566
----	------------	------------	-------------	------------	------------

No	Kab/Kota	TOT BELANJA 04	BLJ APARATUR 04	BLJ PUBLIK 04	TOT PENDAPATAN 04
1	Kab. Cilacap	523,337,907	91,764,753	431,573,154	553,424,551
2	Kab. Banyumas	516,693,407	90,056,029	426,637,378	516,693,407
3	Kab. Purbalingga	372,316,170	67,353,793	304,962,377	372,501,555
4	Kab. Banjarnegara	397,115,066	103,637,543	293,477,523	397,115,066
5	Kab. Kebumen	453,921,251	260,914,278	193,006,973	453,921,251
6	Kab. Purworejo	382,549,153	114,593,498	266,955,655	381,549,153
7	Kab. Wonosobo	379,520,761	31,618,237	347,902,524	379,520,761
8	Kab. Magelang	422,350,945	317,684,710	104,666,235	423,450,491
9	Kab. Boyolali	413,593,384	40,358,971	373,234,413	413,593,384
10	Kab. Klaten	521,279,938	118,132,932	403,147,006	521,279,938
11	Kab. Sukoharjo	330,962,303	58,740,276	272,222,027	365,774,471
12	Kab. Wonogiri	438,609,804	104,967,674	333,642,130	438,618,754
13	Kab. Karanganyar	353,553,293	114,468,925	249,084,368	363,553,293
14	Kab. Sragen	382,919,089	116,496,619	266,422,470	398,757,706
15	Kab. Grobogan	477,429,085	265,586,874	211,842,211	477,524,085
16	Kab. Blora	402,824,797	88,044,232	314,780,565	402,824,797
17	Kab. Rembang	297,723,442	183,687,751	104,035,691	287,723,442
18	Kab. Pati	459,117,913	317,540,352	141,577,561	459,117,913
19	Kab. Kudus	327,839,604	269,255,520	58,584,084	334,060,526
20	Kab. Jepara	369,329,109	107,412,883	261,916,226	369,329,109
21	Kab. Demak	382,576,935	74,569,004	308,007,931	384,376,935
22	Kab. Semarang	389,931,132	100,924,182	289,006,950	389,931,132
23	Kab. Temanggung	270,789,601	196,876,190	73,913,411	335,340,254
24	Kab. Kendal	451,526,660	80,513,693	370,012,967	473,156,816
25	Kab. Batang	347,513,390	89,639,513	257,873,877	347,513,390
26	Kab. Pekalongan	326,297,893	101,640,352	224,657,541	326,297,893
27	Kab. Pemasang	405,560,095	85,267,027	320,293,068	405,560,095
28	Kab. Tegal	449,131,544	109,514,882	339,616,662	449,131,544
29	Kab. Brebes	465,356,794	135,118,951	340,237,843	475,356,794
30	Kota Magelang	195,170,735	75,533,722	119,637,013	195,845,745
31	Kota Surakarta	337,772,348	61,277,403	276,494,945	35,506,479
32	Kota Salatiga	190,533,868	77,253,336	113,280,532	190,533,868

33	Kota Semarang	578,949,615	104,254,956	474,694,659	671,653,985
34	Kota Pekalongan	142,601,831	37,756,716	104,845,115	184,835,687
35	Kota Tegal	269,877,994	149,066,009	140,811,985	289,887,994

No	Kab/Kota	PAJAK 04	RETRIBUSI 04	PENGANGGURAN 04	KEMISKINAN 04
1	Kab. Cilacap	22,505,000	15,882,700	9.79	20.9
2	Kab. Banyumas	12,130,000	24,435,021	5	21.47
3	Kab. Purbalingga	4,573,593	19,756,020	4.56	31.2
4	Kab. Banjarnegara	4,792,587	14,515,882	6.69	26.91
5	Kab. Kebumen	5,385,377	12,114,139	5.79	30.95
6	Kab. Purworejo	4,597,000	15,637,567	3.04	23.51
7	Kab. Wonosobo	3,729,900	11,637,607	3.28	33.15
8	Kab. Magelang	15,141,389	16,076,930	6.08	16.1
9	Kab. Boyolali	5,944,989	20,075,012	6.25	18.47
10	Kab. Klaten	10,195,000	8,970,624	7.68	23.38
11	Kab. Sukoharjo	9,676,500	8,093,043	9.08	14.38
12	Kab. Wonogiri	5,277,000	15,538,231	5.04	23.43
13	Kab. Karanganyar	9,739,500	10,078,103	5.26	16.14
14	Kab. Sragen	4,961,500	15,608,644	4.27	26.06
15	Kab. Grobogan	5,959,300	26,472,938	5.46	29.3
16	Kab. Blora	5,237,500	13,989,000	3.65	22.97
17	Kab. Rembang	4,688,500	13,543,534	5.05	32
18	Kab. Pati	8,687,135	25,850,937	4.76	20.67
19	Kab. Kudus	11,031,769	23,328,640	7.28	11.47
20	Kab. Jepara	8,615,000	20,660,100	4.3	9.88
21	Kab. Demak	5,037,522	15,758,921	9.21	24.97
22	Kab. Semarang	11,940,693	22,820,022	4.55	13.68
23	Kab. Temanggung	3,490,000	10,836,525	3.78	15.22
24	Kab. Kendal	8,382,000	25,500,450	4.61	20.87
25	Kab. Batang	4,845,000	9,511,682	9.14	19.01
26	Kab. Pekalongan	5,661,986	4,535,875	5.63	21.5
27	Kab. Pemasang	5,098,000	15,071,002	7.57	22.31
28	Kab. Tegal	8,989,800	23,075,689	7.67	20.53
29	Kab. Brebes	7,795,000	9,563,176	6.89	29.1
30	Kota Magelang	3,554,700	13,996,259	9.09	14.01

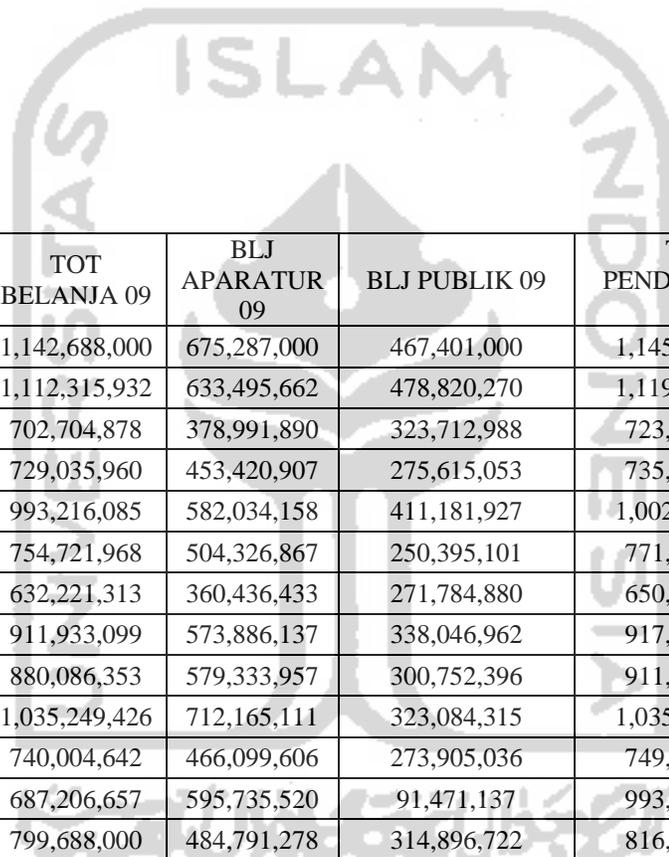
31	Kota Surakarta	24,575,000	27,380,077	8.06	13.73
32	Kota Salatiga	4,492,100	11,334,621	13.29	9.68
33	Kota Semarang	81,830,000	53,739,295	12.2	5.6
34	Kota Pekalongan	5,303,279	4,230,363	11.8	6.81
35	Kota Tegal	5,708,002	17,620,563	9.29	9.49

No	Kab/Kota	PDRB (t-1)	PDRB (t)	PE 04	PARPOL 04
1	Kab. Cilacap	11,073,898	11,785,981	0.064	952,063
2	Kab. Banyumas	2,222,762	2,295,006	0.033	918,899
3	Kab. Purbalingga	2,086,005	2,135,324	0.024	476,321
4	Kab. Banjarnegara	2,414,485	2,483,842	0.029	508,319
5	Kab. Kebumen	1,903,315	1,907,818	0.002	378,792
6	Kab. Purworejo	2,996,259	3,113,539	0.039	430,687
7	Kab. Wonosobo	1,971,051	2,000,456	0.015	460,397
8	Kab. Magelang	2,647,801	2,679,229	0.012	732,463
9	Kab. Boyolali	3,440,683	3,543,427	0.030	569,018
10	Kab. Klaten	2,969,606	3,107,333	0.046	727,841
11	Kab. Sukoharjo	4,502,964	4,663,340	0.036	479,073
12	Kab. Wonogiri	2,016,696	2,089,174	0.036	588,944
13	Kab. Karanganyar	4,578,996	4,802,551	0.049	485,055
14	Kab. Sragen	2,468,226	2,552,610	0.034	520,692
15	Kab. Grobogan	1,758,053	1,815,148	0.032	408,101
16	Kab. Blora	1,926,962	1,982,044	0.029	224,858
17	Kab. Rembang	2,647,453	2,714,395	0.025	346,935
18	Kab. Pati	2,929,178	3,025,407	0.033	684,335
19	Kab. Kudus	12,992,236	14,018,287	0.079	398,154
20	Kab. Jepara	3,041,014	3,107,041	0.022	580,073
21	Kab. Demak	2,262,105	2,320,164	0.026	552,097
22	Kab. Semarang	3,662,184	3,703,506	0.011	544,638
23	Kab. Temanggung	1,985,295	2,058,605	0.037	246,937
24	Kab. Kendal	4,569,133	4,645,712	0.017	531,563
25	Kab. Batang	2,703,096	2,724,225	0.008	406,414
26	Kab. Pekalongan	2,915,444	2,954,810	0.014	451,566
27	Kab. Pemalang	1,984,652	2,053,852	0.035	694,563
28	Kab. Tegal	1,793,143	1,873,605	0.045	745,709

29	Kab. Brebes	2,292,670	2,396,290	0.045	92,111
30	Kota Magelang	7,049,757	7,223,426	0.025	75,415
31	Kota Surakarta	7,093,055	7,152,440	0.008	313,785
32	Kota Salatiga	4,887,270	5,018,855	0.027	98,389
33	Kota Semarang	10,604,747	10,951,149	0.033	846,966
34	Kota Pekalongan	5,785,148	5,967,357	0.031	156,598
35	Kota Tegal	3,727,893	3,912,200	0.049	136,536

No	Kab/Kota	PAD 09	TOT PENDAPATAN 09	REALISASI PAD 09	TARGET PAD 09
1	Kab. Cilacap	120,047,513	1,145,896,000	120,047,513	102,780,342
2	Kab. Banyumas	70,912,562	1,119,645,892	70,912,562	107,425,765
3	Kab. Purbalingga	81,617,693	723,616,514	81,617,693	63,795,200
4	Kab. Banjarnegara	60,636,815	735,706,757	60,636,815	46,528,340
5	Kab. Kebumen	62,281,026	1,002,507,096	62,281,026	58,599,425
6	Kab. Purworejo	60,814,317	771,603,437	60,814,317	51,174,861
7	Kab. Wonosobo	46,324,944	650,556,313	46,324,944	38,158,244
8	Kab. Magelang	75,398,029	917,428,200	75,398,029	81,203,386
9	Kab. Boyolali	73,985,149	911,865,201	73,985,149	63,733,408
10	Kab. Klaten	54,398,522	1,035,749,426	54,398,522	49,549,622
11	Kab. Sukoharjo	48,842,528	749,939,426	48,842,528	41,898,319
12	Kab. Wonogiri	57,092,965	993,684,065	57,092,965	54,129,295
13	Kab. Karanganyar	66,604,710	816,254,255	66,604,710	64,470,676
14	Kab. Sragen	72,681,309	824,751,328	72,681,309	65,561,026
15	Kab. Grobogan	46,890,617	886,959,252	46,890,617	59,922,461
16	Kab. Blora	49,699,411	875,816,690	49,699,411	50,203,193
17	Kab. Rembang	58,887,895	613,395,830	58,887,895	51,150,558
18	Kab. Pati	90,396,848	997,766,005	90,396,848	80,677,766
19	Kab. Kudus	73,709,952	903,229,818	73,709,952	71,520,068
20	Kab. Jepara	71,948,111	814,171,648	71,948,111	70,427,234
21	Kab. Demak	49,822,371	750,859,243	49,822,371	43,817,065
22	Kab. Semarang	90,389,871	806,997,157	90,389,871	82,942,881
23	Kab. Temanggung	47,300,791	616,850,551	47,300,791	37,773,970
24	Kab. Kendal	77,378,000	802,139,813	77,378,000	71,684,588
25	Kab. Batang	44,643,602	619,709,623	44,643,602	41,192,714
26	Kab. Pekalongan	58,402,728	697,562,248	58,402,728	50,136,941

27	Kab. Pemalang	81,819,334	785,699,775	81,819,334	66,737,480
28	Kab. Tegal	70,551,139	916,683,023	70,551,139	59,370,632
29	Kab. Brebes	80,275,021	1,059,171,798	80,275,021	71,896,767
30	Kota Magelang	49,373,992	475,326,056	49,373,992	40,549,584
31	Kota Surakarta	101,972,318	848,467,817	101,972,318	102,929,502
32	Kota Salatiga	52,911,035	436,482,235	52,911,035	45,149,902
33	Kota Semarang	306,112,423	1,612,732,526	306,112,423	267,914,251
34	Kota Pekalongan	28,540,801	394,309,549	28,540,801	30,098,049
35	Kota Tegal	90,840,877	483,825,087	90,840,877	69,567,244



No	Kab/Kota	TOT BELANJA 09	BLJ APARATUR 09	BLJ PUBLIK 09	TOT PENDAPATAN 09
1	Kab. Cilacap	1,142,688,000	675,287,000	467,401,000	1,145,896,000
2	Kab. Banyumas	1,112,315,932	633,495,662	478,820,270	1,119,645,892
3	Kab. Purbalingga	702,704,878	378,991,890	323,712,988	723,616,514
4	Kab. Banjarnegara	729,035,960	453,420,907	275,615,053	735,706,757
5	Kab. Kebumen	993,216,085	582,034,158	411,181,927	1,002,507,096
6	Kab. Purworejo	754,721,968	504,326,867	250,395,101	771,603,437
7	Kab. Wonosobo	632,221,313	360,436,433	271,784,880	650,556,313
8	Kab. Magelang	911,933,099	573,886,137	338,046,962	917,428,200
9	Kab. Boyolali	880,086,353	579,333,957	300,752,396	911,865,201
10	Kab. Klaten	1,035,249,426	712,165,111	323,084,315	1,035,749,426
11	Kab. Sukoharjo	740,004,642	466,099,606	273,905,036	749,939,426
12	Kab. Wonogiri	687,206,657	595,735,520	91,471,137	993,684,065
13	Kab. Karanganyar	799,688,000	484,791,278	314,896,722	816,254,255
14	Kab. Sragen	810,434,328	516,252,657	294,181,671	824,751,328
15	Kab. Grobogan	817,576,726	489,306,644	328,270,082	886,959,252
16	Kab. Blora	871,729,611	466,120,000	405,609,611	875,816,690
17	Kab. Rembang	593,545,830	355,792,081	237,753,749	613,395,830
18	Kab. Pati	985,495,864	563,870,806	421,625,058	997,766,005
19	Kab. Kudus	900,714,818	437,723,227	462,991,591	903,229,818
20	Kab. Jepara	804,538,898	409,765,351	394,773,547	814,171,648
21	Kab. Demak	739,360,443	392,244,102	347,116,341	750,859,243
22	Kab. Semarang	787,322,200	431,796,735	355,525,465	806,997,157
23	Kab. Temanggung	609,737,958	347,874,616	261,863,342	616,850,551
24	Kab. Kendal	799,715,984	444,374,616	355,341,368	802,139,813

25	Kab. Batang	613,547,116	338,103,394	275,443,722	619,709,623
26	Kab. Pekalongan	697,228,628	410,289,717	286,938,911	697,562,248
27	Kab. Pemasang	769,847,455	443,014,557	326,832,898	785,699,775
28	Kab. Tegal	913,245,073	497,961,739	415,283,334	916,683,023
29	Kab. Brebes	1,043,263,656	629,492,836	413,770,820	1,059,171,798
30	Kota Magelang	471,234,037	209,628,508	261,605,529	475,326,056
31	Kota Surakarta	842,537,656	402,524,783	440,012,873	848,467,817
32	Kota Salatiga	430,982,235	192,000,000	238,982,235	436,482,235
33	Kota Semarang	1,604,782,526	760,645,376	844,137,150	1,612,732,526
34	Kota Pekalongan	390,964,549	184,657,611	206,306,938	394,309,549
35	Kota Tegal	478,915,243	191,562,078	287,353,165	483,825,087

No	Kab/Kota	PAJAK 09	RETRIBUSI 09	PENGANGGURAN 09	KEMISKINAN 09
1	Kab. Cilacap	38,381,000	40,533,000	11.45	19.88
2	Kab. Banyumas	18,755,000	66,122,257	8.05	21.52
3	Kab. Purbalingga	10,532,546	42,347,647	4.66	24.97
4	Kab. Banjarnegara	6,853,500	34,288,588	5.07	21.36
5	Kab. Kebumen	10,755,000	28,613,850	8.12	25.73
6	Kab. Purworejo	6,465,500	9,323,263	4.94	17.02
7	Kab. Wonosobo	5,200,000	24,300,756	3.26	25.91
8	Kab. Magelang	21,917,855	31,386,570	4.95	15.19
9	Kab. Boyolali	10,619,190	40,664,838	5.51	15.96
10	Kab. Klaten	20,464,500	12,400,488	6.36	19.68
11	Kab. Sukoharjo	16,481,826	18,849,743	8.28	11.51
12	Kab. Wonogiri	6,455,500	30,538,484	5.03	19.08
13	Kab. Karanganyar	21,355,480	12,165,622	8.26	14.73
14	Kab. Sragen	10,101,049	37,748,713	5.78	19.7
15	Kab. Grobogan	8,905,600	30,411,724	6.07	18.68
16	Kab. Blora	6,595,900	21,964,361	6.99	17.7
17	Kab. Rembang	9,046,700	38,422,605	5.64	25.86
18	Kab. Pati	13,385,000	16,077,293	7.68	15.92
19	Kab. Kudus	17,866,612	43,299,168	7.36	10.8
20	Kab. Jepara	13,500,000	45,913,885	4.4	9.59
21	Kab. Demak	9,126,250	24,295,554	5.72	19.7
22	Kab. Semarang	17,970,670	56,186,169	7.88	10.66

23	Kab. Temanggung	5,603,566	20,453,415	4.24	15.05
24	Kab. Kendal	14,790,000	31,304,822	5.64	16.02
25	Kab. Batang	7,846,135	20,072,908	7.11	16.61
26	Kab. Pekalongan	9,347,224	31,519,281	4.18	17.93
27	Kab. Pemasang	9,317,000	30,185,700	12.26	22.17
28	Kab. Tegal	14,471,001	9,236,607	9.24	13.98
29	Kab. Brebes	14,002,998	39,324,835	9.24	24.93
30	Kota Magelang	4,694,504	33,065,591	14.95	10.11
31	Kota Surakarta	49,725,000	37,483,907	10.44	14.99
32	Kota Salatiga	7,575,681	5,306,196	10.95	7.824
33	Kota Semarang	143,850,000	70,907,783	10.66	4.841
34	Kota Pekalongan	9,768,800	7,364,979	8.61	8.559
35	Kota Tegal	9,458,425	8,134,324	15.74	9.877

No	Kab/Kota	PDRB (t-1)	PDRB (t)	PE 09	PARPOL 09
1	Kab. Cilacap	11,689,092	12,303,308	0.053	958,076
2	Kab. Banyumas	4,171,468	4,400,542	0.055	927,776
3	Kab. Purbalingga	2,257,392	2,384,014	0.056	483,998
4	Kab. Banjarnegara	2,619,989	2,753,935	0.051	506,747
5	Kab. Kebumen	2,721,254	2,828,395	0.039	674,263
6	Kab. Purworejo	2,737,087	2,872,723	0.050	425,626
7	Kab. Wonosobo	1,741,148	1,808,247	0.039	465,888
8	Kab. Magelang	3,761,388	3,938,764	0.047	732,036
9	Kab. Boyolali	3,899,372	4,100,520	0.052	564,924
10	Kab. Klaten	4,567,200	4,761,018	0.042	721,206
11	Kab. Sukoharjo	4,540,751	4,756,902	0.048	473,742
12	Kab. Wonogiri	2,770,435	2,901,577	0.047	583,981
13	Kab. Karanganyar	4,900,690	5,076,549	0.036	487,054
14	Kab. Sragen	2,729,450	2,893,427	0.060	510,968
15	Kab. Grobogan	2,948,793	3,097,093	0.050	726,776
16	Kab. Blora	1,913,763	2,010,908	0.051	496,355
17	Kab. Rembang	2,093,412	2,186,736	0.045	350,319
18	Kab. Pati	4,162,082	4,357,144	0.047	68,923
19	Kab. Kudus	11,683,819	12,125,681	0.038	415,607
20	Kab. Jepara	3,889,988	4,085,438	0.050	573,816

21	Kab. Demak	2,787,524	2,901,151	0.041	557,023
22	Kab. Semarang	5,079,003	5,300,723	0.044	551,921
23	Kab. Temanggung	2,219,155	2,309,841	0.041	462,619
24	Kab. Kendal	4,822,465	5,020,087	0.041	539,643
25	Kab. Batang	2,169,854	2,250,616	0.037	419,158
26	Kab. Pekalongan	2,970,214	3,098,072	0.043	447,908
27	Kab. Pemasang	3,142,808	3,293,056	0.048	672,501
28	Kab. Tegal	3,286,263	3,466,785	0.055	728,419
29	Kab. Brebes	4,998,528	5,247,897	0.050	91,151
30	Kota Magelang	993,835	1,044,650	0.051	72,571
31	Kota Surakarta	4,549,342	4,817,877	0.059	302,805
32	Kota Salatiga	832,154	869,452	0.045	101,951
33	Kota Semarang	19,156,814	20,057,621	0.047	862,166
34	Kota Pekalongan	1,887,853	1,966,751	0.042	155,837
35	Kota Tegal	1,166,587	1,225,424	0.050	136,726

No	Kab/Kota 2004	Rasio_1	Rasio_2	Rasio_3	Rasio_4	Rasio_5	Rasio_6	Rasio_7
1	Kab. Cilacap	0.097	1.108	0.946	0.175	0.825	0.421	0.297
2	Kab. Banyumas	0.099	1.131	1.000	0.174	0.826	0.237	0.477
3	Kab. Purbalingga	0.080	1.052	1.000	0.181	0.819	0.154	0.664
4	Kab. Banjarnegara	0.076	1.197	1.000	0.261	0.739	0.158	0.479
5	Kab. Kebumen	0.058	0.436	1.000	0.575	0.425	0.205	0.461
6	Kab. Purworejo	0.057	0.998	1.003	0.300	0.698	0.211	0.716
7	Kab. Wonosobo	0.063	0.979	1.000	0.083	0.917	0.156	0.488
8	Kab. Magelang	0.103	1.212	0.997	0.752	0.248	0.349	0.370
9	Kab. Boyolali	0.089	1.128	1.000	0.098	0.902	0.161	0.543
10	Kab. Klaten	0.052	1.206	1.000	0.227	0.773	0.375	0.330
11	Kab. Sukoharjo	0.057	1.047	0.905	0.177	0.823	0.464	0.388
12	Kab. Wonogiri	0.067	1.120	1.000	0.239	0.761	0.180	0.531
13	Kab. Karanganyar	0.068	0.981	0.972	0.324	0.705	0.394	0.408
14	Kab. Sragen	0.109	1.013	0.960	0.304	0.696	0.114	0.358
15	Kab. Grobogan	0.089	1.139	1.000	0.556	0.444	0.140	0.623
16	Kab. Blora	0.075	1.069	1.000	0.219	0.781	0.173	0.461
17	Kab. Rembang	0.065	1.060	1.035	0.617	0.349	0.251	0.724
18	Kab. Pati	0.120	1.348	1.000	0.692	0.308	0.158	0.470
19	Kab. Kudus	0.128	1.110	0.981	0.821	0.179	0.258	0.546

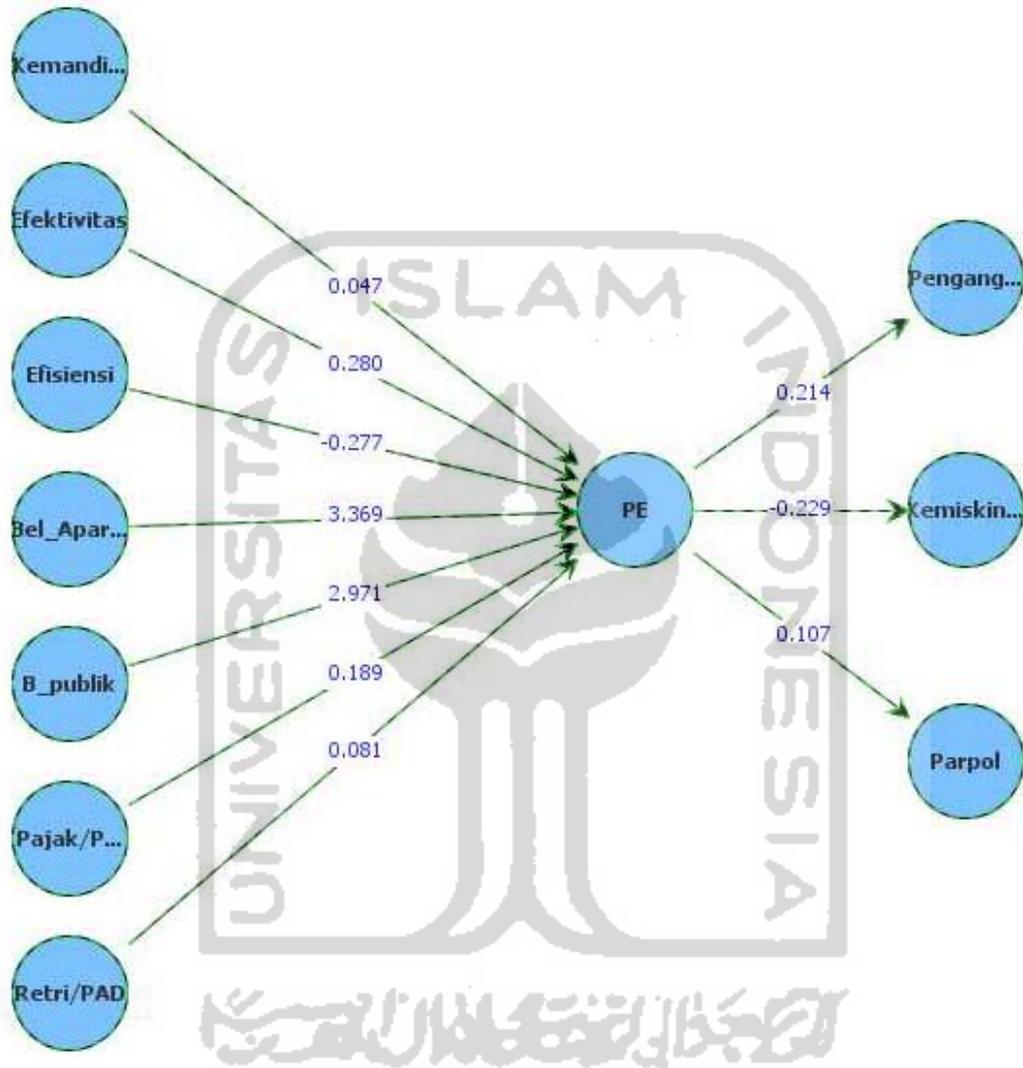
20	Kab. Jepara	0.130	0.891	1.000	0.291	0.709	0.180	0.431
21	Kab. Demak	0.045	0.689	0.995	0.195	0.805	0.288	0.903
22	Kab. Semarang	0.114	1.107	1.000	0.259	0.741	0.268	0.511
23	Kab. Temanggung	0.057	1.025	0.808	0.727	0.273	0.183	0.569
24	Kab. Kendal	0.067	0.871	0.954	0.178	0.819	0.263	0.800
25	Kab. Batang	0.068	1.013	1.000	0.258	0.742	0.205	0.403
26	Kab. Pekalongan	0.071	1.023	1.000	0.311	0.689	0.243	0.195
27	Kab. Pemasang	0.060	0.843	1.000	0.210	0.790	0.209	0.617
28	Kab. Tegal	0.093	1.018	1.000	0.244	0.756	0.214	0.551
29	Kab. Brebes	0.049	0.916	0.979	0.290	0.731	0.337	0.413
30	Kota Magelang	0.114	0.946	0.997	0.387	0.613	0.160	0.628
31	Kota Surakarta	1.662	1.077	9.513	0.181	0.819	0.416	0.464
32	Kota Salatiga	0.113	1.098	1.000	0.405	0.595	0.208	0.524
33	Kota Semarang	0.232	1.088	0.862	0.180	0.820	0.525	0.345
34	Kota Pekalongan	0.086	1.160	0.772	0.265	0.735	0.334	0.267
35	Kota Tegal	0.146	1.205	0.931	0.552	0.522	0.135	0.416

No	Kab/Kota 2009	Rasio_1	Rasio_2	Rasio_3	Rasio_4	Rasio_5	Rasio_6	Rasio_7
1	Kab. Cilacap	0.105	1.168	0.997	0.591	0.409	0.320	0.338
2	Kab. Banyumas	0.063	0.660	0.993	0.570	0.430	0.264	0.932
3	Kab. Purbalingga	0.113	1.279	0.971	0.539	0.461	0.129	0.519
4	Kab. Banjarnegara	0.082	1.303	0.991	0.622	0.378	0.113	0.565
5	Kab. Kebumen	0.062	1.063	0.991	0.586	0.414	0.173	0.459
6	Kab. Purworejo	0.079	1.188	0.978	0.668	0.332	0.106	0.153
7	Kab. Wonosobo	0.071	1.214	0.972	0.570	0.430	0.112	0.525
8	Kab. Magelang	0.082	0.929	0.994	0.629	0.371	0.291	0.416
9	Kab. Boyolali	0.081	1.161	0.965	0.658	0.342	0.144	0.550
10	Kab. Klaten	0.053	1.098	1.000	0.688	0.312	0.376	0.228
11	Kab. Sukoharjo	0.065	1.166	0.987	0.630	0.370	0.337	0.386
12	Kab. Wonogiri	0.057	1.055	0.692	0.867	0.133	0.113	0.535
13	Kab. Karanganyar	0.082	1.033	0.980	0.606	0.394	0.321	0.183
14	Kab. Sragen	0.088	1.109	0.983	0.637	0.363	0.139	0.519
15	Kab. Grobogan	0.053	0.783	0.922	0.598	0.402	0.190	0.649
16	Kab. Blora	0.057	0.990	0.995	0.535	0.465	0.133	0.442
17	Kab. Rembang	0.096	1.151	0.968	0.599	0.401	0.154	0.652
18	Kab. Pati	0.091	1.120	0.988	0.572	0.428	0.148	0.178

19	Kab. Kudus	0.082	1.031	0.997	0.486	0.514	0.242	0.587
20	Kab. Jepara	0.088	1.022	0.988	0.509	0.491	0.188	0.638
21	Kab. Demak	0.066	1.137	0.985	0.531	0.469	0.183	0.488
22	Kab. Semarang	0.112	1.090	0.976	0.548	0.452	0.199	0.622
23	Kab. Temanggung	0.077	1.252	0.988	0.571	0.429	0.118	0.432
24	Kab. Kendal	0.096	1.079	0.997	0.556	0.444	0.191	0.405
25	Kab. Batang	0.072	1.084	0.990	0.551	0.449	0.176	0.450
26	Kab. Pekalongan	0.084	1.165	1.000	0.588	0.412	0.160	0.540
27	Kab. Pemasang	0.104	1.226	0.980	0.575	0.425	0.114	0.369
28	Kab. Tegal	0.077	1.188	0.996	0.545	0.455	0.205	0.131
29	Kab. Brebes	0.076	1.117	0.985	0.603	0.397	0.174	0.490
30	Kota Magelang	0.104	1.218	0.991	0.445	0.555	0.095	0.670
31	Kota Surakarta	0.120	0.991	0.993	0.478	0.522	0.488	0.368
32	Kota Salatiga	0.121	1.172	0.987	0.445	0.555	0.143	0.100
33	Kota Semarang	0.190	1.143	0.995	0.474	0.526	0.470	0.232
34	Kota Pekalongan	0.072	0.948	0.992	0.472	0.528	0.342	0.258
35	Kota Tegal	0.188	1.306	0.990	0.400	0.600	0.104	0.090

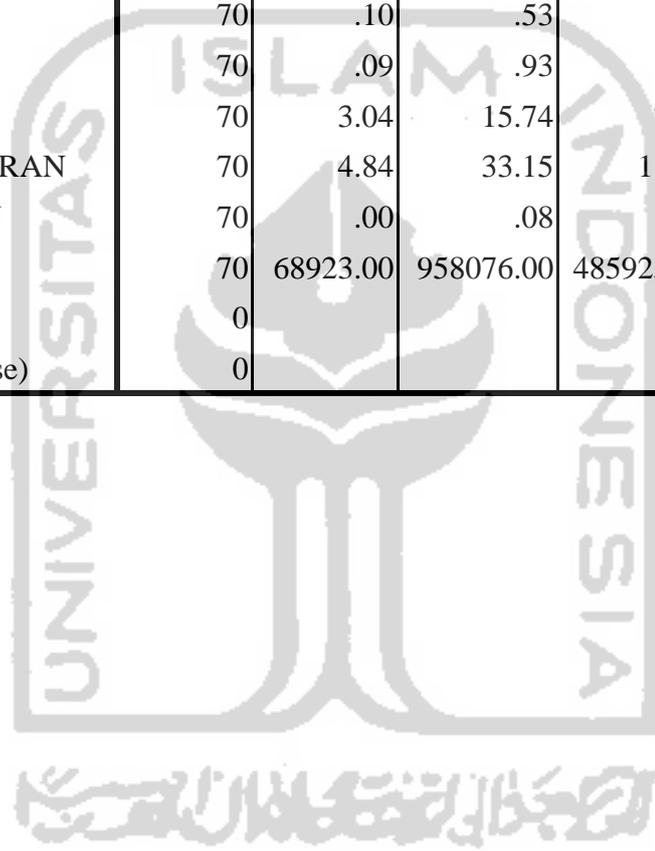


LAMPIRAN 2
HASIL OLAH DATA



Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemandirian	70	.44	1.35	1.0706	.15127
Efektivitas	70	.69	9.51	1.0972	1.02186
Efisiensi	70	.08	.87	.4521	.19193
Bel_aparatur	70	.13	.92	.5491	.19254
Bel_publik	70	.10	.53	.2269	.10529
Pajak	70	.09	.93	.4639	.17389
Retribusi	70	3.04	15.74	7.1401	2.81811
PENGANGGURAN	70	4.84	33.15	18.3270	6.72179
KEMISKINAN	70	.00	.08	.0390	.01447
PE	70	68923.00	958076.00	485925.5286	2.28547E5
PARPOL	0				
Valid N (listwise)	0				



SmartPLS report

Table of contents (whole)

Bootstrapping results

Table of contents

- [Settings](#)
- [results for inner weights](#)
- [results for outer loadings](#)
- [results for outer weights](#)
- [outer weights for each sample](#)
- [outer loadings for each sample](#)
- [inner weights for each sample](#)

Settings

[[CSV-Version](#)]

number of cases in original sample	70
preprocessing option	no changes
cases per sample	70
number of samples	70

[Table of contents](#)

results for inner weights

[[CSV-Version](#)]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
Kemandirian -> PE	0.047	0.136	0.552	0.086
Efektivitas -> PE	0.280	0.201	0.166	1.681
Efisiensi -> PE	-0.277	-0.360	0.616	0.449
Bel_Aparatur -> PE	3.369	4.471	2.756	1.222
B_publik -> PE	2.971	4.012	2.758	1.077
Pajak/PAD -> PE	0.189	0.205	0.109	1.740
Retri/PAD -> PE	0.081	0.012	0.096	0.849
PE -> Pengangguran	0.214	0.207	0.107	1.992
PE -> Kemiskinan	-0.229	-0.222	0.095	2.399
PE -> Parpol	0.107	0.137	0.140	0.759

[Table of contents](#)

results for outer loadings

[[CSV-Version](#)]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
Kemandirian				
Kemandirian	0.190	0.177	0.117	1.626
Efektivitas				
Efektivitas	0.150	0.137	0.016	9.229
Efisiensi				
Efisiensi	1.015	0.914	0.677	1.498
Bel_Aparatur				
Bel_aparatur	0.191	0.190	0.010	18.857
B_publik				
Bel_publik	0.191	0.190	0.010	18.824
Pajak/PAD				
Pajak	0.105	0.105	0.008	13.304

Retri/PAD				
Retribusi	0.173	0.168	0.018	9.566
PE				
PE	0.014	0.014	0.001	11.396
Pengangguran				
PENGANGGURAN	2.798	2.664	0.350	8.000
Kemiskinan				
KEMISKINAN	6.674	6.517	0.441	15.119
Parpol				
PARPOL	226908.954	219065.104	14435.107	15.719

[Table of contents](#)

results for outer weights

[[CSV-Version](#)]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
Kemandirian				
Kemandirian	5.273	14.419	14.692	0.359
Efektivitas				
Efektivitas	6.658	7.388	0.937	7.104
Efisiensi				
Efisiensi	0.986	7.448	9.580	0.103
Bel_Aparatur				
Bel_aparatur	5.248	5.279	0.280	18.761
B_publik				
Bel_publik	5.231	5.265	0.281	18.646
Pajak/PAD				
Pajak	9.567	9.592	0.682	14.024
Retri/PAD				
Retribusi	5.792	6.024	0.645	8.974
PE				
PE	69.630	72.098	6.865	10.143
Pengangguran				

PENGANGGURAN	0.357	0.382	0.054	6.579
Kemiskinan				
KEMISKINAN	0.150	0.154	0.011	14.031
Parpol				
PARPOL	0.000	0.000	0.000	14.437

R-square

[[CSV-Version](#)]

	R-square
Kemandirian	
Efektivitas	
Efisiensi	
Bel_Aparatur	
B_publik	
Pajak/PAD	
Retri/PAD	
PE	0.337
Pengangguran	0.046
Kemiskinan	0.052
Parpol	0.011

[Table of contents](#)

Composite Reliability

[[CSV-Version](#)]

	Composite Reliability
Kemandirian	0.036
Efektivitas	0.023
Efisiensi	1.029
Bel_Aparatur	0.036
B_publik	0.037
Pajak/PAD	0.011
Retri/PAD	0.030
PE	0.000
Pengangguran	7.828
Kemiskinan	44.537
Parpol	51487673409.792

[Table of contents](#)

Average variance extracted (AVE)

[[CSV-Version](#)]

	Average variance extracted (AVE)
Kemandirian	0.036
Efektivitas	0.023
Efisiensi	1.029
Bel_Aparatur	0.036
B_publik	0.037
Pajak/PAD	0.011
Retri/PAD	0.030
PE	0.000
Pengangguran	7.828
Kemiskinan	44.537
Parpol	51487673409.792

[Table of contents](#)

Cross loadings

[[CSV-Version](#)]

	Kemandirian	Efektivitas	Efisiensi	Bel_Aparatur
Bel_aparatur	-0.175	0.194	-0.228	0.191
Bel_publik	0.176	-0.192	0.226	-0.189
Efektivitas	0.054	0.150	0.004	0.029
Efisiensi	5.271	0.023	1.015	-0.179
Kemandirian	0.190	0.068	1.250	-0.033
KEMISKINAN	-6.196	-7.577	-3.150	-0.809
Pajak	0.133	-0.106	0.149	-0.027
PARPOL	-103377.344	-74970.337	-134944.164	-6756.093
PE	-0.018	0.023	-0.025	0.006
PENGANGGURAN	1.769	2.026	0.676	-0.226
Retribusi	-0.049	-0.346	0.003	-0.010

	B_publik	Pajak/PAD	Retri/PAD	PE
Bel_aparatur	-1.011	-0.007	-0.111	0.000
Bel_publik	0.191	0.007	0.097	-0.000
Efektivitas	-0.152	-0.004	-0.550	0.000
Efisiensi	0.951	0.033	0.024	-0.000
Kemandirian	0.175	0.007	-0.097	-0.000
KEMISKINAN	3.928	-0.280	23.049	-0.000
Pajak	0.144	0.105	-0.216	-0.000
PARPOL	24339.285	9670.359	167706.860	0.107
PE	-0.033	-0.000	-0.016	0.014
PENGANGGURAN	1.278	0.115	-8.603	0.000
Retribusi	0.049	-0.006	0.173	-0.000

	Pengangguran	Kemiskinan	Parpol
Bel_aparatur	-1.086	-0.008	-0.033
Bel_public	1.153	0.008	0.023
Efektivitas	1.448	-0.012	-0.055
Efisiensi	2.562	-0.026	-0.525
Kemandirian	1.591	-0.012	-0.095
KEMISKINAN	-226.825	6.674	4.923
Pajak	1.996	-0.010	0.172
PARPOL	-2754412.257	10329.066	226908.954
PE	0.215	-0.001	0.009
PENGANGGURAN	2.798	-0.488	-2.825
Retribusi	-3.864	0.022	0.077

[Table of contents](#)

Correlations of the latent variables

[[CSV-Version](#)]

	Kemandirian	Efektivitas	Efisiensi	Bel_Aparatur
Kemandirian	1.000			
Efektivitas	0.068	1.000		
Efisiensi	0.983	0.004	1.000	
Bel_Aparatur	-0.174	0.194	-0.178	1.000
B_public	0.174	-0.190	0.176	-0.998
Pajak/PAD	0.240	-0.193	0.213	-0.260
Retri/PAD	-0.053	-0.380	0.002	-0.060
PE	-0.233	0.301	-0.264	0.444
Pengangguran	0.120	0.137	0.036	-0.081
Kemiskinan	-0.176	-0.215	-0.070	-0.122
Parpol	-0.086	-0.063	-0.089	-0.030

	B publik	Pajak/PAD	Retri/PAD	PE	Pengangguran	Kemiskinan	Parpol
Kemandirian							
Efektivitas							
Efisiensi							
Bel_Aparatur							
B publik	1.000						
Pajak/PAD	0.259	1.000					
Retri/PAD	0.053	-0.214	1.000				
PE	-0.433	-0.037	-0.115	1.000			
Pengangguran	0.086	0.272	-0.319	0.214	1.000		
Kemiskinan	0.111	-0.278	0.358	-0.229	-0.485	1.000	
Parpol	0.020	0.282	0.077	0.107	-0.173	0.126	1.000

